



**KEBIJAKAN PRAGMATIS PARTAI DAKWAH  
(Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) dalam bidang Kajian Islam  
pada Program Studi Timur Tengah dan Islam  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

**Oleh:  
BUDI SANTOSA  
710509230x**

T  
35437

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM  
KAJIAN ISLAM  
2008**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**

## ABSTRAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) . Partai Keadilan bermula dari gerakan tarbiyah yang dipelopori oleh aktifis dakwah kampus yang terbangun selama bertahun-tahun di mushala-mushala dan masjid-masjid di beberapa universitas yang dengan terjadinya gejolak reformasi 1998 kemudian bertransformasi menjadi gerakan politik.

Fakta mengatakan bahwa kemudian partai ini menjadi sebuah fenomena karena pada tahun PEMILU 2004 berhasil memperoleh dukungan yang cukup signifikan dan dengan perolehan 45 kursi DPR, PKS menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan.

Salah satu daya tarik yang menonjol yang diusung oleh PKS adalah label "partai dakwah", yang memberikan sebuah pernyataan bahwa politik bagi PKS bukan sekedar upaya untuk meraih kekuasaan namun memakainya sebagai kendaraan dakwah.

Isu ini menjadi sebuah magnet utama para pemilih karena pada awal-awal gerakannya telah berhasil disajikan dengan baik oleh para kader PKS dengan tampilnya mereka sebagai sosok-sosok idealis dan memperlihatkan gaya tersendiri sebagai politisi-politisi berpenampilan sederhana jauh dari kemewahan, yang secara demonstratif dimotori oleh pemimpinnya yaitu DR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang kemudian berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua MPR) dengan menolak fasilitas-fasilitas yang berlebihan layaknya pejabat negara.

Namun dalam dinamika yang berjalan, dengan makin memudarnya politik aliran serta menyeruaknya pragmatisme dalam masyarakat sendiri, yang kemudian secara massif menjadi sebuah keniscayaan bahwa terjun dalam politik ujungnya adalah pencapaian target-target kuantitatif berupa perolehan suara dalam pemilu, perolehan kursi di parlemen dan keberhasilan merebut jabatan-jabatan kepala daerah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, hal tersebut tak pelak memberikan pengaruh kepada PKS sebagai sebuah entitas yang menjadi bagian darinya.

Terlihat kemudian PKS mulai mengakomodir ide-ide pragmatis sebagai sarana mencapai target, dengan melansir isu-isu yang pada saat-saat sebelumnya niscaya menjadi hal-hal yang dihindari.

Tesis ini berusaha mengupas produk-produk kebijakan PKS yang bisa digolongkan sebagai kebijakan pragmatis terutama dalam usahanya mencapai target perolehan suara sebesar 20% pada PEMILU Legislatif 2009, dan dampak-dampaknya bagi PKS sendiri serta kontradiksi-kontradiksi jika dilawankan dengan label yang disandang sebagai partai dakwah.

## ABSTRACT

*Partai Keadilan Sejahtera* (The Prosperous Justice Party, or PKS) was a continuation from *Partai Keadilan* (The Justice Party, or PK). The Justice Party began as a religious movement which was pioneered by university campus activists who built religious gatherings for several years in prayer rooms and mosques in numerous universities. With the rise of the reform movement in 1998, this movement later transformed into a political organization.

The facts show that this party became a phenomenon in the 2004 national elections by winning a significant amount of support, and after obtaining 45 seats in the national parliament (the DPR), PKS became a force to be reckoned with. One of the definitive attractions which was created by PKS was the label of a "*dakwah* party" (or propagation party), which made the statement that politics for PKS was not just an effort to gain power but was rather a vehicle for *dakwah* (propagation of Islam).

This issue became the primary magnet for voters because from the very beginning of the movement, the party had succeeded in presenting this intention in a clear way. This was done through the use of PKS cadres who appeared as idealists and demonstrated their own style as politicians, who favored a simple appearance that was far from a luxurious lifestyle. The active demonstration of their intentions was pioneered by Dr. Hidayat Nur Wahid (the first President of PKS who later became the head of the MPR, the People's Consultative Assembly). Dr. Hidayat Nur Wahid actively rejected the excessive facilities that came with his high-level government position.

However, with the dynamic nature of the situation at the moment, where the impact of politics is decreasing and society is becoming more pragmatic, it has become clear that any groups entering politics are simply interested in achieving quantitative targets based on the number of votes in the election, the number of seats in parliament, and the eventual quarreling over political appointments at the regional and national levels. The reality of this situation has in turn made an impact on PKS, as this party is also an entity which is currently engaging in the political process in Indonesia.

It then became clear that PKS started to accommodate more pragmatic ideas as a method for achieving their targets, by socializing ideas which in the previous period would have been avoided.

This thesis will attempt to analyze those political policies of PKS which can be categorized as pragmatic policies and ideas, especially those which are aimed at achieving their target of 20% of votes in the 2009 Legislative Election. This thesis will also examine the effect on PKS itself as well as the contradictions which might arise if these policies are compared with the parties label as a propagation (*dakwah*) party.

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Panitia Sidang Ujian Tesis  
Program Pascasarjana Universitas Indonesia  
Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam

Hari, tanggal sidang : Sabtu, 10 Januari 2009

Nama Mahasiswa : **Budi Santosa**

NPM : 710509230x

Kekhususan : Kajian Islam

Judul Tesis : **KEBIJAKAN PRAGMATIS PARTAI DAKWAH  
(Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera)**

Ketua Sidang,

Pembimbing,



(Dr. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si)



(Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi, MA)

Penguji,

Reader/Pembaca Ahli,



(Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA)



(Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a	خ	kh	ش	sy	غ	gh	ن	n
ب	b	د	d	ص	sh	ف	f	و	w
ت	t	ذ	dz	ض	dh	ق	q	هـ	h
ث	ts	ر	r	ط	th	ك	k	ء	'
ج	j	ز	z	ظ	zh	ل	l	ي	y
ح	h	س	s	ع	'	م	m		

## PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rizki berupa kesempatan kepada penulis untuk menempuh sebuah jenjang pendidikan yang walaupun secara tertatih-tatih, pada akhirnya bisa diselesaikan.

Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-2 Kajian Islam pada Program Studi Timur Tengah dan Islam. Masalah yang diangkat adalah adanya proses dinamis yang terjadi pada sebuah partai politik berasaskan Islam yang pada kurun waktu 1997 – 2008 telah menjadi sebuah fenomena menarik, dimana sebuah komunitas aktifis dakwah kampus mendirikan partai politik tanpa didukung dengan figur-figur kharismatik, namun berbekal sebuah sistem pengkaderan yang tertata rapi dan dijalankan dengan disiplin, akhirnya berhasil memperoleh dukungan suara yang cukup signifikan. Partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun dengan perkembangan cara pandang masyarakat terhadap partai politik yang cenderung pragmatis, mau tidak mau PKS kemudian mendapatkan pengaruh-pengaruh yang lewat proses-proses tertentu akhirnya mewarnai perubahan-perubahan sikap para kader PKS.

Untuk itu penulis ingin mengungkap sejauh mana pengaruh pragmatisme dalam masyarakat mewarnai gerak langkah para politisi dan kader PKS yang notabene mencantumkan label sebagai “partai dakwah”.

Penulis berharap tulisan yang jauh dari sempurna ini dapat menjadi sumbangsih sederhana bagi khasanah pustaka Indonesia dan kritik membangun secara khusus kepada PKS.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penulisan tesis ini bisa diselesaikan, teriring doa semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT, kepada :

1. Bp. Dr. Muhammad Luthfi Zuhdi, MA
2. Bp. Ahmad Ramzy Tadjoeidin, BA., MPA
3. Bp. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, M.Si.
4. Bp. Drs. M. Hamdan Basyar, M.Si.
5. Istriku Shinta Dewi

6. Anak-anakku Lala-Janur-Fina
7. Ibu Mien
8. Bp. E. Tata & Ibu Rien.
9. Wulan – Angga – Sasi
10. 5 kakak kandungku
11. Dii.

Kekurangan adalah pakaian manusia. Demikian juga dengan tesis ini yang serba kurang ini, semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amien.



## Daftar Isi

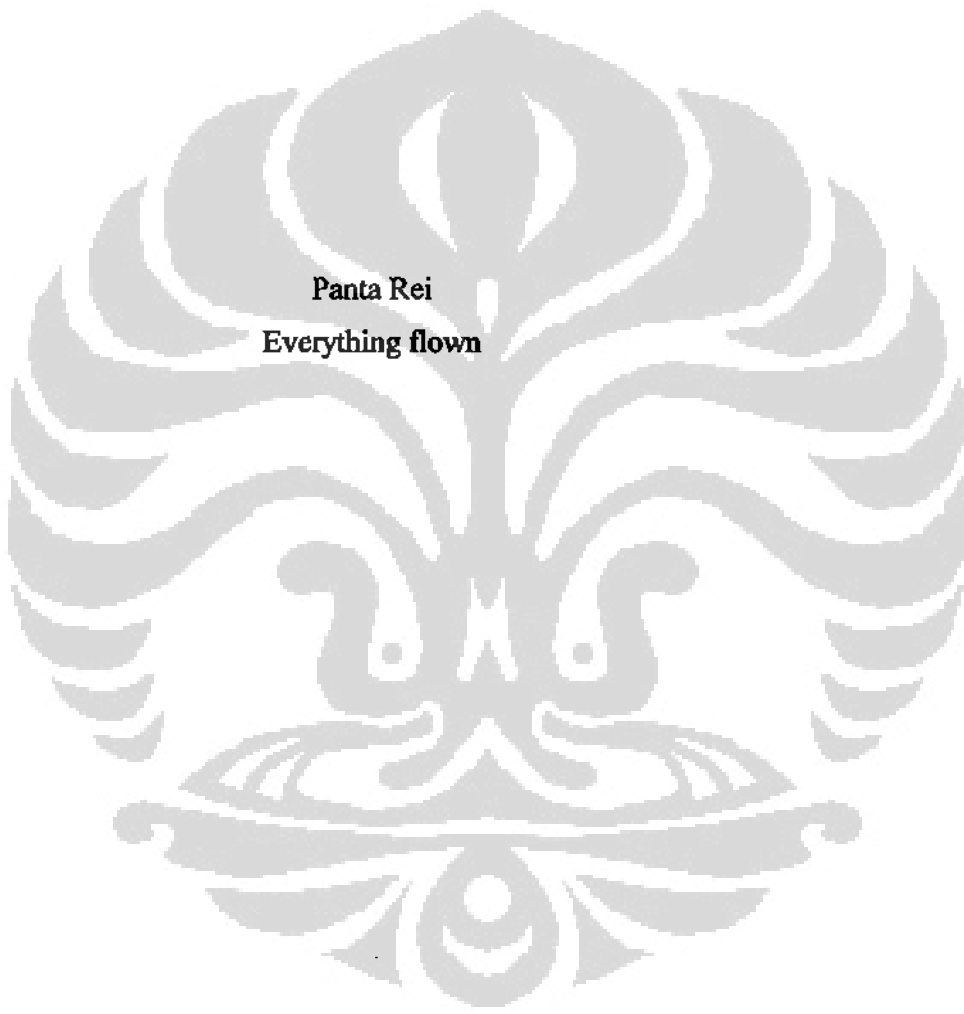
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
EPILOG.....	x
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Masalah .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Pembahasan .....	6
	8
<b>Bab II Kerangka Teori</b>	
2.1. Konsepsi Pragmatisme .....	8
2.1.1. Asal Lahirnya Pragmatisme .....	8
2.1.2. Makna Pragmatisme .....	9
2.1.3. Perilaku pragmatis Partai Politik .....	12
	16
<b>Bab III Metodologi Penelitian</b>	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
3.2. Pembatasan Masalah .....	17
3.3. Metode Penelitian .....	17
3.4. Pengumpulan Data Penelitian .....	20
3.5. Analisa Data Penelitian .....	22



<b>Bab IV Studi Analisa Kebijakan Pragmatis Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>24</b>
<b>4.1. Selayang Pandang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</b> .....	<b>24</b>
<b>4.2. Platform PKS</b> .....	<b>27</b>
4.2.1. Bidang Politik .....	29
4.2.2. Bidang Perekonomian .....	32
4.2.3. Bidang Sosial Budaya .....	37
4.2.4. Kebijakan Partai .....	39
<b>4.3. Dakwah Politik</b> .....	<b>44</b>
4.3.1. Partai Dakwah .....	49
4.3.2. Ideologi Partai .....	54
<b>4.4. Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera</b> .....	<b>57</b>
<b>4.5. Kebijakan Pragmatisme Partai</b> .....	<b>67</b>
4.5.1. Menjadi Partai Yang Terbuka .....	68
4.5.2. Memudarnya Ideologi .....	70
4.5.3. Memudarnya Gerakan Sosial .....	73
4.5.4. Memudarnya Idealisme .....	75
	<b>80</b>
<b>Bab V Penutup</b>	
5.1. Kesimpulan .....	80
5.2. Saran-Saran .....	81
Daftar Pustaka.....	82

## EPILOG

**So, When you have finished your work, devote yourself to Allah worship**  
**QS, As-Sharh (94:7)**



**Panta Rei**  
**Everything flown**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbagai jurus senantiasa di kedepankan oleh berbagai partai politik dalam menghadapi Pemilihan Umum (pemilu). Janji-janji menjadi murahan saat berkoar di depan kader maupun simpatisan. Adagium dalam politik adalah tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi, memang ada betulnya pribahasa tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai janji calon Anggota Legislatif (caleg) saat berkampaye untuk mengambil hati konstituen.

Dalam kancah politik di Indonesia, partai-partai didirikan dengan berbagai macam latar belakang. Beberapa partai didirikan dengan idealisme yang kental, sementara yang lain didirikan hanya karena kebutuhan pragmatis elit politik.

Beberapa partai yang beraliran nasionalis diwakili oleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan partai lainnya. Ada pula partai yang berbasiskan umat Islam akan tetapi tidak menganut partai Islam, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan yang lainnya. Juga partai yang berideologikan Islam serta mengusung nilai-nilai Islam dalam perjuangannya, di antara partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan yang lainnya.

Jika dirunut, perjuangan politik umat Islam lebih bersumber pada perbedaan misi perjuangan, sebab enggan menentukan skala prioritas, terjebak pada pragmatisme keuntungan sesaat dan jangka pendek, juga faktor fanatisme yang dominan. Sehingga berbagai sikap dan kebijakan partai kadang berseberangan dengan sesama partai yang berhaluan Islam.

Namun, ciri ideologis parpol tenggelam seiring dengan mengentalnya pragmatisme yang ada. Memang parpol-parpol masa kini berbeda dengan tempo dulu (1950-an) yang kental nuansa ideologisnya. Mungkin karena karakter masyarakat yang berkembang semakin pragmatis, maka tawaran-tawaran ideologis yang diberikan oleh beberapa partai yang berciri ideologis tertentu (Islam, misalnya), tampak mental (berbalik).

Buktinya parpol-parpol yang menang dalam pemilu, adalah yang berideologi pragmatis. Orang tidak memilih berdasar pertimbangan ideologis. Karena realitas inilah, maka dapat dipahami, Partai Keadilan Sejahtera misalnya ingin mengubah jargon dari partai moral (ideologis) menjadi partai profesional.

Boleh jadi benturan kepentingan yang membuat masing-masing partai mempunyai corak dan kebijakan sendiri. Bisa jadi ini adalah penilaian negatif di saat melihat beragamnya partai Islam. Tapi di sisi lain, dalam penilaian positif dengan berbagai kebijakan politik yang disikapi oleh partai-partai Islam merupakan bentuk keragaman yang dapat saling menguntungkan simbiosis mutualistik

Memang seperti itulah keberadaan sebuah partai, yang secara intrinsik menekankan adanya pemisahan kelas, perbedaan kelompok dan pertukaran nilai sebagai persoalan yang signifikan yang memunculkan adanya demokrasi pluralis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitupula politik memang berfungsi sebagai penyalur ideologi dan menyalurkan kepentingan.

Menurut Dhurorudin (hal 26, 2008) hakikat politik dari segi umpan balik (*feed back*), partai dapat pula membantu memastikan bahwa pembentukan peraturan legislatif sudah tepat dan dapat diterapkan dengan baik. Partai politik memang berfungsi<sup>4</sup> sebagai *ideology channeling* (penyalur ideologi) sekaligus *interest representation* (perwakilan kepentingan).

Penyalur ideologi dan perwakilan kepentingan inilah yang menjadi fungsi partai politik, sehingga sikap dan kebijakan sebuah partai politik acap kali berubah. Hal ini apa yang terjadi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam pandangan masyarakat, partai ini melekat dengan partai eksklusif, yang menampilkan jargon dan simbol Islam dalam merekrut konstituen.

Makna eksklusif partai ini karena pada dasarnya basis dari partai ini adalah kaderisasi yang sistemis, sebagaimana agenda partai yang menargetkan kader partai ini dalam menyambut pemilu 2009 adalah 2 juta.<sup>1</sup> Jumlah kadernya pada pemilu 2004 sebanyak 400.000 kader. Sehingga terget pertumbuhannya yang baru adalah 1,6 juta. Tentu target ini tidaklah main-main karena kaderisasi mereka dilakukan dengan gencar.

Di sisi lain, kebijakan partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi pemilu 2009 melakukan beberapa perubahan yang dinilai telah keluar dari mainstream partai, sehingga partai ini tidak lagi menjadi partai eksklusif, tetapi telah berubah menjadi partai inklusif (terbuka). Hal ini sebagaimana pernyataan ketua Dewan Syariah partai yang mengamini akan adanya keterbukaan partai dalam rekrutmen caleg. Surahman berkata, "Tekad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka sudah bulat. Keputusan menjadi partai terbuka sudah dipikirkan sebelumnya dan bukan untuk ikut-ikutan, Kami melakukannya dengan keyakinan dan penuh keikhlasan."<sup>2</sup>

Dikatakan Surahman, andaikata Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Sanur 1-4 Februari memutuskan PKS menjadi partai terbuka, semuanya telah didasarkan atas pertimbangan yang matang dan telah melalui kajian yang mendalam. Karena dalam setiap pengambilan keputusan, PKS selalu mendasarinya pada tiga hal, yakni pada kajian atau ilmu, pada keyakinan, dan ketiga dengan keikhlasan.

Kelak lanjut Surahman, bila PKS menjadi partai terbuka, maka siapa pun boleh menjadi anggota dan pengurus PKS, bahkan duduk mewakili partai di legislatif. Yang penting lanjutnya, yang bersangkutan memiliki komitmen yang sama dengan partai.

Dari pemaparan Surahman dengan tegas bahwa partai ini sudah memasuki ranah keterbukaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan langkah kongkrit, yaitu, membuka peluang untuk menjadi anggota dan pengurus partai di luar kader serta

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Dari Qiyadah Untuk Para Kader*, Arah Press, Cet. I, 2007, hal 6.

<sup>2</sup> [www.pks.or.id](http://www.pks.or.id). Lihat juga blog [pks.banjar](http://pks.banjar).

siap menerima calon legislatif dari manapun asalnya. Dua hal yang menjadi inklusifitas PKS.

Anggota legislatif dari PKS, Zulkieflimansyah, mengamini apa yang dikatakan oleh Surahman, PKS akan menjadi partai Islamis sekaligus nasionalis. Dia mengungkapkan, "Bahwa Partai Keadilan Sejahtera bergumul dengan masalah kebangsaan dan keislaman sedari awal pembentukannya, hal ini diilhami pula dari teks "Indonesia Kita" karya Nurcholish Madjid. Partai Keadilan Sejahtera membuka diri sebagai parpol berkarakter Islam Indonesia masa depan."<sup>3</sup>

Tentu ada harapan dan keinginan dalam perubahan kebijakan ini, setidaknya PKS menargetkan adanya penambahan suara di luar kadernya, dan boleh jadi strateginya guna membuka diri bagi kaum non muslim. Dengan keterbukaan ini, PKS berharap mampu meraih simpati lebih banyak dari berbagai komunitas, termasuk dari kaum nasional sekuler.

Menurut Zulkieflimansyah, "Intinya spirit kebhinekaan PKS menyimpan potensi dahsyat, dan PKS memang siap melebarkan sayapnya, antara lain dengan merangkul non muslim sebagai kadernya."<sup>4</sup>

Boleh jadi ini adalah perubahan besar dan mendasar dalam dunia politik di Indonesia. Di saat hilangnya dikotomi sekuler-religius. Gejala seperti ini memang sudah dapat dilihat dalam Pilpres 2004. Semua pasangan capres dan cawapres terdiri atas dua sejoli, sekuler dan religius. Keduanya adalah perkembangan dari dikotomi santri-abangan. Istilah yang biasa dipakai, nasionalis dan religius atau nasionalis religius dan religius nasionalis.

Tidak ada lagi dikotomi-dikotomi, sebuah pengkotak-kotakan partai yang akan merangkul konstituen demi kepentingan kelompoknya. Dikotomi sosial antara priayi dan wong cilik sudah lama mengabur. Boleh jadi, inilah yang mengilhami beberapa partai untuk merubah haluan dalam kebijakan politiknya. Hal ini dapat kita lihat pada saat pemilihan presiden tahun 2004 yang menempatkan era inklusif dan juga kepentingan pragmatisme partai untuk meraih dukungan yang memadai.

---

<sup>3</sup> [www.inilah.com](http://www.inilah.com)

<sup>4</sup> *Ibid.*

Lihatlah kasus ini, yang merupakan gejala menarik dalam kancanh perpolitikan nasional, Wiranto-Salahuddin Wahid (sekuler-religius), Megawati-Hasyim Muzadi (sekuler-religius), Amien Rais-Siswono Yudo Husodo (religius-sekuler), Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla (sekuler-religius), dan Hamzah Haz-Agum Gumelar (religius-sekuler).

Dikotomi budaya abangan dan santri yang mempunyai latar belakang panjang itu juga mengabur secara pelan-pelan. Semula abangan dan santri memang sangat berpengaruh pada dunia politik. Ada Si Merah dan Si Putih, ada PKI, PNI, dan Masyumi/NU. Dalam kepercayaan-kepercayaan nativistik (Agama Jawa, Saminisme, Sarekat Abangan), agama kaum santri ditolak. Namun, dikotomi ideologi ini mulai memudar berkat adanya mobilitas budaya. Dari dikotomi budaya abangan dan santri inilah lahir dikotomi budaya yang baru, yaitu sekuler dan religius. Oleh karena itu, Pilpres 2004 yang menggabungkan sekuler dan religius hanyalah konsekuensi logis dari proses yang lama. Hasilnya adalah pragmatisme politik.!

Obyek permasalahan inilah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini, yaitu tentang pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera, terutama yang menyangkut dengan strategi kebijakan politik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, terlihat bahwa ada permasalahan yang perlu dikaji dalam hal pragmatisme politik partai. Permasalahan yang ingin diperoleh jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses terjadinya kebijakan pragmatis dalam Partai Keadilan Sejahtera ?
2. Mengapa Partai Keadilan Sejahtera melakukan kebijakan pragmatis ?
3. Sejauhmana strategi dan implementasi kebijakan politik pragmatis yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera ?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Guna mengetahui proses tarik ulur yang dilakukan politikus-politikus yang bermuara dari Partai Keadilan Sejahtera serta menganalisa pemikiran dan pendapat mereka.
2. Untuk meneliti dan mengkaji kebijakan pragmatis politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera.
3. Untuk mendapatkan bukti kongkrit dari strategi tersebut, serta mengetahui implementasi kebijakan dalam ranah politik di tanah air.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Ditinjau dari teoritis, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi khazanah pemikiran politik di Indonesia, khususnya dalam masalah peranan Islam dalam politik tanah air dan partai politik islam atau berbasis islam di ranah nusantara.

Untuk tinjauan praktis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para politikus dan pemerhati politik yang bergelut dalam bidang politik yang berkembang di tanah air, khususnya mengenai partai politik Islam atau yang berbasis massa Islam. *Allahu A'lam.*

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Hasil dalam penelitian ini akan disajikan dalam 5 bab, dengan rincian sebagai berikut :

#### **Bab. I Pendahuluan**

##### **1.1.Latar Belakang Masalah**

##### **1.2.Perumusan Masalah**

##### **1.3.Tujuan Masalah**

##### **1.4.Manfaat Penelitian**

##### **1.5.Sistematika Pembahasan**



## **Bab II. Kerangka Teori**

### **2.1. Konsepsi Pragmatisme**

#### **2.1.1. Asal Lahirnya Pemahaman Pragmatis**

#### **2.1.2. Makna Pragmatisme**

#### **2.1.3. Pragmatis Partai Politik**

## **Bab III. Metodologi Penelitian**

### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

### **3.2. Paradigma Metodologi**

### **3.3. Metode Penelitian**

### **3.4. Unit Analisis Penelitian**

### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

### **3.6. Metode Analisis Data**

## **Bab IV. Studi Analisa Kebijakan Pragmatis Partai Keadilan Sejahtera**

### **4.1. Selayang Pandang Partai Keadilan Sejahtera.**

### **4.2. Platform PKS**

#### **4.2.1. Bidang Politik**

#### **4.2.2 Bidang Ekonomi**

#### **4.2.3 Bidang Sosial Budaya**

#### **4.2.4. Kebijakan Partai**

### **4.3. Dakwah Politik**

#### **4.3.1. Partai Dakwah**

#### **4.3.2. Ideologi Partai**

### **4.4. Kebijakan Partai Keadilan Dan Sejahtera**

#### **4.4.1. Menjadi Partai Yang Terbuka**

#### **4.4.2. Memudarnya Ideologi**

#### **4.4.3. Memudarnya Gerakan Sosial**

#### **4.4.4. Memudarnya Idealisme**

## **Bab V Penutup**

### **5.1.Saran**

### **5.2.Kesimpulan**

### **Daftar Pustaka**

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1. Konsepsi Pragmatisme**

##### **2.1.1. Asal Lahirnya Pragmatisme**

Pragmatisme adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori, semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya, yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini.

Menurut Titus, Smith dan Nolan, (1979: 340) pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Peirce (1839-1842), yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952). Tentu saja, Pragmatisme tak dapat dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan ide-ide sebelumnya di Eropa, sebagaimana tak dapat diingkari pula adanya pengaruh dan imbas baliknya terhadap ide-ide yang dikembangkan lebih lanjut di Eropa. William James mengatakan bahwa Pragmatisme yang diajarkannya, merupakan “nama baru bagi sejumlah cara berpikir lama”. Dan dia sendiri pun menganggap pemikirannya sebagai kelanjutan dari Empirisme Inggris, seperti yang dirintis oleh Francis Bacon (1561-1626), yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679) dan John Locke (1632-1704).

Pragmatisme, di samping itu, telah mempengaruhi filsafat Eropa dalam berbagai bentuknya, baik filsafat Eksistensialisme maupun Neorealisme dan Neopositivisme. Pragmatisme, tak diingkari telah menjadi semacam ruh yang menghidupi tubuh ide-ide dalam ideologi Kapitalisme, yang telah disebarkan Barat ke seluruh dunia melalui penjajahan dengan gaya lama maupun baru. Dalam konteks inilah, Pragmatisme dapat dipandang berbahaya karena telah mengajarkan dua sisi kekeliruan sekaligus kepada dunia yakni standar kebenaran pemikiran dan standar perbuatan manusia. Atas dasar itu, mereka yang bertanggung jawab

terhadap kemanusiaan tak dapat mengelak dari sebuah tugas mulia yang menantang, yakni menjinakkan bahaya Pragmatisme dengan mengkaji dan mengkritisnya, sebagai landasan strategis untuk melakukan dekonstruksi (penghancuran bangunan ide)

Pragmatisme dianggap juga salah satu aliran yang berpangkal pada Empirisme, kendatipun ada pula pengaruh Idealisme Jerman (Hegel) pada John Dewey, seorang tokoh pragmatisme yang dianggap pemikir paling berpengaruh pada zamannya. Selain John Dewey, tokoh pragmatisme lainnya adalah Charles Pierce dan William James.<sup>5</sup>

### 2.1.2. Makna Pragmatisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme merupakan berasal dari akar kata dari pragmatis yang bermakna, *pertama*, bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai atau bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. *Kedua*, mengenai atau bersangkutan dengan pragmatisme.

Adapun pragmatisme memiliki tiga arti, *pertama*, kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan dan sebagainya) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. *Kedua*, paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak tetap melainkan tumbuh dan berubah terus. *Ketiga*, pandangan yang memberi penjelasan akibat berdasarkan kenyataan untuk tujuan praktis.<sup>6</sup>

Istilah Pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang berarti perbuatan (*action*) atau tindakan (*practice*). Isme di sini sama artinya dengan isme-isme lainnya, yaitu berarti aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian Pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah “faedah” atau “manfaat”. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh

<sup>5</sup> Titus, Harold H, Smith, Marilyn S, Nolan, Richard, *Living Issues In Philosophy*, (terj. Rasjidi, H.M, *Persoalan-Persoalan Filsafat*) Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal 340-345. lihat juga makalah Muhammad Shiddiq Al Jawi, makalah disampaikan dalam *Halaqah Syahriyah* (Kajian Bulanan) Hizbut Tahrir, di Bogor, bulan Agustus 1995 dengan tema, Dekonstruksi Pragmatisme.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, 2002 Jakarta, Balai Pustaka dan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu benar kalau berfungsi (*if it works*).<sup>7</sup>

Dengan demikian Pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai teori kebenaran (*theory of truth*), sebagaimana yang tampak menonjol dalam pandangan William James, terutama dalam bukunya *The Meaning of The Truth* (1909). Kebenaran menurut James adalah sesuatu yang terjadi pada ide, yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi, tidak diketahui kebenaran teori itu. Atas dasar itu, kebenaran itu bukan sesuatu yang statis atau tidak berubah, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Kebenaran akan selalu berubah, sejalan dengan perkembangan pengalaman, karena yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya.<sup>8</sup>

Dalam *The Meaning of The Truth* (1909), James menjelaskan metode berpikir yang mendasari pandangannya di atas. Dia mengartikan kebenaran itu harus mengandung tiga aspek. *Pertama*, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain, siap diuji dengan perdebatan atau diskusi. *Kedua*, kebenaran merupakan suatu pernyataan fakta, artinya ada sangkut pautnya dengan pengalaman. *Ketiga*, kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta James, dengan demikian dapat dilihat sebagai pengajur Empirisme dengan cara berpikir induktif.

Menurut James, *pemikir Rasionalis* adalah orang yang bekerja dan menyelidiki sesuatu secara deduktif, dari yang menyeluruh ke bagian-bagian. Rasionalis berusaha mendeduksi yang umum ke yang khusus, mendeduksi fakta dari prinsip. Sedang *pemikir Empirisme*, berangkat dari fakta yang

---

<sup>7</sup> Titus, Smith, Nolan, *ibid*.

<sup>8</sup> Lihat juga, Karya William James, *Pragmatism*, New York, Longmans, Green, 1907.

khusus (partikular) kepada kesimpulan umum yang menyeluruh. Seorang Empiris membuat generalisasi dari induksi terhadap fakta-fakta partikular.<sup>9</sup>

Tetapi *Empirisme* James adalah Empirisme Radikal, berbeda dengan empirisme tradisional yang kurang memperhatikan hubungan-hubungan antar fakta. Empirisme radikal melihat bahwa hubungan yang mempertautkan pengalaman-pengalaman, harus merupakan hubungan yang dialami.

Pragmatisme yang diserukan oleh James ini yang juga disebut *Practicalisme*, sebenarnya merupakan perkembangan dan olahan lebih jauh dari Pragmatisme Peirce. Hanya saja, Peirce lebih menekankan penerapan Pragmatisme ke dalam bahasa, yaitu untuk menerangkan arti-arti kalimat sehingga diperoleh kejelasan konsep dan pembedaannya dengan konsep lain. Dia menggunakan pendekatan matematik dan logika simbol (bahasa), berbeda dengan James yang menggunakan pendekatan psikologi.

Dalam memahami kemajemukan kebenaran (pernyataan), Peirce membagi kebenaran menjadi dua.<sup>10</sup> Pertama adalah *Trancendental Truth*, yaitu kebenaran yang bermukim pada benda itu sendiri. Yang kedua adalah *Complex Truth*, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Kebenaran jenis ini dibagi lagi menjadi kebenaran etis atau psikologis, yaitu keselarasan pernyataan dengan apa yang diimani si pembicara, dan kebenaran logis atau literal, yaitu keselarasan pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Semua kebenaran pernyataan ini, harus diuji dengan konsekuensi praktisnya melalui pengalaman.

John Dewey mengembangkan lebih jauh mengembangkan Pragmatisme James. Jika James mengembangkan Pragmatisme untuk memecahkan masalah-masalah individu, maka Dewey mengembangkan Pragmatisme dalam rangka mengarahkan kegiatan intelektual untuk mengatasi masalah sosial yang timbul di awal abad ini. Dewey menggunakan pendekatan biologis dan psikologis, berbeda dengan James yang tidak menggunakan pendekatan biologis. Dewey menerapkan Pragmatismenya dalam dunia pendidikan Amerika dengan

---

<sup>9</sup> Bertrand, Russell, *History of Philosophy and its Connention with Political the Earliest Times to the Present Day*, (Sigit Jatniko, dkk. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*), Pustaka Pelajar, hal. 1057-1059, 2004.

<sup>10</sup> Lihat, [www.wikimu.com](http://www.wikimu.com)

mengembangkan suatu teori *problem solving*, yang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merasakan adanya masalah.
2. Menganalisis masalah itu, dan menyusun hipotesis-hipotesis yang mungkin.
3. Mengumpulkan data untuk memperjelas masalah.
4. Memilih dan menganalisis hipotesis.
5. Menguji, mencoba, dan membuktikan hipotesis dengan melakukan eksperimen/pengujian.

Meskipun berbeda-beda penekanannya, tetapi ketiga pemikir utama Pragmatisme menganut garis yang sama, yakni kebenaran suatu ide harus dibuktikan dengan pengalaman. Para pencetus memberikan metode filsafat pragmatisme adalah metode empiris. Pragmatisme dalam aliran filsafat ialah suatu sikap, suatu metode dan suatu filsafat yang menggunakan akibat-akibat yang praktis dari ide-ide atau keyakinan-keyakinan sebagai suatu ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenarannya.

### 2.1.3. Perilaku Pragmatis Partai Politik

Sadar atau tidak sadar, diakui atau pun tidak, terdapat pergeseran dalam kancah politik di tanah air, terutama yang menyangkut kebijakan partai dalam mempertahankan eksistensinya. Banyak jargon yang dijual pada konstituen agar dapat mengikuti kembali hajat besar lima tahunan, pemilihan umum.

Keberadaan dan gerakan partai dalam era reformasi berbeda dengan era sebelumnya masa Orde Lama. Partai-partai pada masa orde lama banyak menjual idealisme agar dapat meraih dukungan massa. Hal ini dapat kita lihat seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang dengan teguh mengusung nasionalis kebangsaan, partai Masyumi yang berpegang teguh pada ideologi agama dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan pemikiran komunisnya.

Ketiga partai ini dapat mewakili *trade mark* partai-partai pada masa orde lama. Politikus-politikus partai tersebut senantiasa memperjuangkan sekaligus mengkampanyekan visi dan misinya, baik itu nasionalisme, agar maupun komunisme.

Sifat seperti ini, menurut Deliar Noer (1996;xii) sebagai fragmentasi kepartaian yang terjadi dalam gerakan modern di Indonesia. Paradigma ini terjadi dalam gerakan ormas maupun politik yang diwakili partai. Sifat seperti ini, sangat dominan pada masa itu baik pada kalangan Islam maupun kalangan kebangsaan.

Adapun bagi Kuntowijoyo, perubahan gerakan partai ini lebih cocok disebut sebagai sebuah transformasi dalam berpolitik. Hal ini terjadi, tidak lepas dari perubahan dalam budaya yang memberikan akses pada pergerakan politik, khususnya kebijakan partai dalam mempertahankan eksistensinya.

*Trade mark* yang diusung partai pada masa orde lama adalah ideologis partai. Sudah tidak asing lagi bila para politikus pada tempo dulu berdebat dalam bentuk negara, dasar negara dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Ciri-ciri ideologis partai pada masa sekarang reformasi sudah mengalami perubahan. Dimana terdapat pergeseran kebijakan yang dilakukan oleh partai politik. Ciri ideologis parpol tenggelam seiring dengan mengentalnya pragmatisme yang ada. Memang partai politik-partai politik masa kini berbeda dengan tempo dulu (1950-an) yang kental nuansa ideologisnya. Mungkin karena karakter masyarakat yang berkembang semakin pragmatis, maka tawaran-tawaran ideologis yang diberikan oleh beberapa partai yang berciri ideologis tertentu (Islam, misalnya), tampak mental (berbalik). Hal ini dapat dibuktikan bahwa parpol-parpol yang menang dalam pemilu, adalah yang berideologi pragmatis. Orang tidak memilih berdasar pertimbangan ideologis.

Inilah yang menurut Alfian Alfian,<sup>12</sup> sebagai pragmatisme partai politik yang merubah haluan karena faktor kepentingan. Tentu perubahan ini didasari suatu hal, yaitu ditinjau dari cara pandang. Subyektivitas parpol, cenderung melihat segala sesuatunya (*stake holder*), apalagi rakyat (yang abstrak itu) sebagai obyek yang ditentukan. Oleh sebab itu, dapat dimaklumi bila ada

---

<sup>11</sup> Hal ini dapat kita lihat mengenai perdebatan masalah hubungan negara dengan rakyatnya terutama yang menyangkut pembukaan undang-undang dasar 45 mengenai hak menjalankan agama sesuai dengan pemeluknya. Pembahasan ini menjadi permalahan yang serius antara politikus agamis –mewakili islam- dan politikus sekuler, nasionalis dan golongan Kristen yang menghendaki dihapusnya pasal tersebut karena alasan keragaman kepercayaan.

<sup>12</sup> Makalah Alfian Alfian, *Gelombang Pragmatisme Partai Politik*, dalam [www.osdir.com](http://www.osdir.com).

pejabat puncak parpol yang mengatakan bahwa upaya pemenangan pemilu menjadi target jangka pendek. Dengan demikian 'jualan' iklan akan mendapat pandangan yang beragam dari masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam cara pandang inilah terjadinya pergeseran (transformasi) partai politik dalam mengusung idealisme, berubah menjadi pragmatisme, dan kebijakan pragmatis sangat kental dalam partai politik tanah air. Lalu apakah kebijakan ini akan memiliki rencana jangka panjang yang ingin di raih? Jawaban dari pertanyaan ini sampai sekarang belum dapat dibuktikan secara nyata oleh partai-paratai politik.

Justru sebaliknya, pergeseran ini semakin mencitrakan mayoritas partai politik indonesia yang menjadikan kursi legislatif dan eksekutif yang menjadi tujuannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih minimnya peran serta para wakil partai yang memiliki idealisme besar setelah menduduki tempat strategis baik di legislatif maupun di eksekutif.

Seperti yang diutarakan di atas, boleh jadi karena realitas inilah maka dapat dipahami, Partai Keadilan Sejahtera misalnya ingin mengubah jargon dari partai dakwah (ideologis) menjadi partai profesional. Pertanyaannya, kenapa harus Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi contoh? Jawabannya adalah Partai Keadilan Sejahtera sampai saat ini merupakan partai yang memiliki kader fanatik dan sistem kaderisasi yang sistematis serta pada perjalanannya selalu mengaktualisasikan diri dengan jargon partai dakwah.. Namun, dalam kebijakan politik ternyata memiliki kecenderungan pragmatis.<sup>14</sup>

Arah perubahan gerakan partai dari ideologis ataupun idealis kepada pragmatis dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Menurut pengamat politik Universitas Nasional Jakarta, Alfian Alfian, dua hal yang ikut andil dalam perubahan partai ke arah pragmatis, yaitu uang dan figur.

---

<sup>13</sup> Kasus yang actual dalam masalah ini banyaknya moment-moment tertentu dijadikan ajang kampanye oleh banyak politikus dalam mengkapayekan dirinya dan partai.

<sup>14</sup> Hal ini dapat dibuktikan dalam kasus pemilihan kepala daerah dan jargon pluralitas yang dikampanyekan oleh pejabat teras partai. Sekalipun pernyataan pejabat teras partai belum tentu mewakili partai. Namun, hal ini sangat susah dipisahkan. Boleh jadi, pernyataan tersebut menjadi indikasi adanya kepentingan pragmatis yang akan diakomodir partai.



Uang ternyata dapat dipakai untuk membeli suara dalam setiap kongres atau munas parpol. Politik uang memang susah dibuktikan, mengingat kecanggihan pemainnya tetapi dapat dirasakan dampaknya. Politik uang ternyata mampu merobohkan bangunan dan proses kaderisasi parpol yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh para pengurus sebelumnya. Menarik dalam konteks ini, ialah munculnya aktor politisi-pengusaha yang bahu-membahu terjun langsung untuk menguasai parpol. Kalau pola yang lazim selama ini, para pengusaha tidak susah-susah ikut berpolitik, melainkan sekedar mensponsori para politisi murni.

Tetapi, kini trennya berbeda, para politisi pengusaha kelihatannya emoh untuk berdiam diri, melainkan terjun langsung mengendalikan komando parpol. Sehingga dengan demikian tak ada kekhawatiran lagi obsesi politiknya terganggu oleh manuver politisi murni yang kadang-kadang merugikan gerak-langkah mereka. Tatkala kritik *conflict of interest* dimunculkan, mereka tenang-tenang saja mungkin etika politik telah dianggap tidak signifikan lagi bagi apakah parpol didukung atau tidak oleh konstituen.

Pragmatisme juga terbaca lewat ketergantungan atas figur politik yang sengaja atau tidak dimitoskan sedemikian rupa. Adakalanya, figur itu kuat karena dipercaya merupakan penyambung ideologis atas tokoh politik berpengaruh tempo dulu, adakalanya ia dianggap ikon reformasi (perubahan) dan belakangan ini muncul tren yang aktual para artis menjadi politikus. Para artis ini boleh jadi menjadi *icon*, yang akan menarik simpati para konstituen. Dan, hampir di seluruh konstituen pemilihan umum 2009 terdapat calon anggota legislatif dari unsur artis.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Partai-partai berlomba menarik artis untuk dijadikan calon anggota legislatif, bahkan mereka menduduki nomor urut jadi posisi teratas -sekalipun adapula di nomor urut '-pelengkap'. Para artis bergabung dengan PDIP, partai Golkar, PPP, partai democrat, PKB, PKS, PAN, Gerindra dan partai lainnya. Ada sebuah pelesetan menggelikan bagi partai amanat nasional (PAN), PAN berubah menjadi partai artis nasional. Karena partai ini menjadikan belasan artis sebagai calon anggota legislative.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada keberadaan suatu Partai yang berhubungan dengan perencanaan dan agenda yang akan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Idealisme dan karakter yang menjadi *trade mark* yang telah menjadi popularitasnya akankah masih dipertahankan dalam menghadapi situasi politik yang terus dinamis atau malah sebaliknya pragmatisme politik telah mengikis ideologi yang diusungnya.

Penelitian ini merupakan kajian kasus yang menjadi obyek kajiannya adalah partai dakwah; Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki karakter sebuah partai dengan sistem kaderisasi yang sistemik. Obyek kajian yang melatarbelakangi kajian ini menyoroti kebijakan dan agenda yang telah dilakukan dan akan direncanakan oleh partai tersebut, baik yang menyangkut dengan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kebijakan dan agenda yang telah dilakukan dan akan direncanakan, penulis teliti guna mendapatkan sebuah kesimpulan (konklusi) yang ilmiah dalam mendukung penelitian tersebut, penulis merujuk kepada tiga referensi, *pertama*, bahan primer yang berupa dokumen-dokumen agenda dan pedoman Partai Keadilan Sejahtera dan wawancara dengan para petinggi partai. *Kedua*, bahan sekunder yang mengeksplanasi data primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya teoritis yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Ketiga*, Bahan penunjang meliputi bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi dan artikel-artikel.

### 3.2. Pembatasan Masalah

Dalam kajian ini, penulis, membatasi obyek pembahasan yang akan di bahas dengan membatasi kepada beberapa permasalahan. Pertama, pembatasan ini meliputi kajian yang di bahas adalah berbagai kebijakan politik Partai Keadilan Sejahtera. Kedua, peta kebijakan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi problematika negara. Ketiga, sikap yang diambil dan dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.

### 3.3. Metode Penelitian

Sebuah keniscayaan dalam membuat karya ilmiah, penulis diharuskan menggunakan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis hendak menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Kata penelitian menurut etimologi ialah terjemahan dari kata *research* (bahasa Inggris, yang berasal dari kata *re*; kembali dan *to search*; mencari), *research* berarti mencari kembali. (lihat Sukidin dan Mundir hal 5, 2005).

Adapun secara terminologi terdapat beberapa definisi, antara lain:

1. Penelitian adalah pencarian sesuatu secara sistematis dengan penekanan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Begitu pula, bahwa yang dimaksud dengan penelitian ialah pencarian pengetahuan dan pemberi artian yang terus menerus terhadap sesuatu. (Nasir hal 14, 1999).
2. Sevilla (hal 2, 1993) mengutarakan bahwa yang dimaksud penelitian atau riset dewasa ini berarti pencarian teori, pengujian teori atau pemecahan masalah.
3. Nawawi dan Martini (hal 174, 1996) menjelaskan maksud penelitian adalah rangkaian kegiatan atau proses mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penelitian ialah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan

pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. (lihat Faisal hal 10, 1995).

5. Sukidin dan Mundir (hal. 5, 2005) menegaskan bahwa penelitian merupakan upaya pemecahan suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah tertentu, teori dan rancangan, serta dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, penelitian memiliki tiga elemen utama, yaitu masalah, teori dan rancangan (yang termasuk di dalamnya sistematika dan prosedur).

Adapun metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (lihat Sugiyono hal 10, 2006). Dengan demikian, komponen dalam penelitian kualitatif ialah, peneliti, obyek yang alamiah analisis data yang bersifat induktif sehingga mengedepankan makna dari penelitiannya.

Metode penelitian kualitatif juga dikenal dengan metode naturalistik dan metode baru yang menggunakan filsafat *postpositivisme*. Dikenal dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami.<sup>16</sup> Sugiyono menegaskan (hal 9, 2006), pada awalnya metode ini disebut etnographi, karena metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Adapun menggunakan filsafat *postpositivisme*, karena sering disebut sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif.

---

<sup>16</sup> Bogdan (dalam Sugiyono hal 19, 2006) mengifustrasikan rancangan penelitian kualitatif seperti seseorang yang hendak rekreasi. Ia baru tahu tempat yang akan dituju, tetapi tentu belum tahu pasti apa yang ada ditempat tersebut. Ia akan tahu setelah memasuki obyek dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, laporan, gambar, berpikir dan melihat obyek serta aktifitas orang yang ada disekitarnya dengan melakukan wawancara dan sebagainya.

Oleh karenanya penelitian kualitatif mempunyai karakteristik yang menggambarkan jenis penelitian ini. Bogdan dan Biklen (dalam Sugiyono hal 14, 2006) menyatakan karakteristik kualitatif itu ialah, pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Ketiga, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Dengan demikian lima hal yang menjadi karakter penelitian kualitatif, kondisi alamiah yang mana peneliti sebagai instrumen pokok, bersifat deskriptif, lebih menekankan proses produk, menganalisa data secara induktif dan mengedepankan makna.

Masih menurut Sugiyono (hal 27, 2006), terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan metode kualitatif, terutama cocok digunakan apabila mendapati obyek yang diteliti, *pertama*, belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap. Karena dengan menggunakan metode ini peneliti akan terjun langsung dengan melakukan penjelajahan, *grounded theory*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. *Kedua*, untuk memahami makna di balik data yang nampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang, setiap ucapan dan tindakan orang sering mempunyai makna tertentu. *Ketiga*, untuk memahami interaksi sosial. *Keempat* untuk memahami perasaan orang, karena perasaan sulit diidentifikasi kecuali dengan terjun langsung, baik wawancara atau pendekatan. *Kelima* mengembangkan teori. Metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Teori yang dibangun melalui *grounded research*. *Keenam*, untuk memastikan kebenaran data. Data sosial sering sulit dipastikan kebenarannya. Oleh karenanya melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi/gabungan, maka kepastian data akan terjamin. *Ketujuh*, meneliti sejarah perkembangan. Seperti menggunakan data dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pelaku sejarah.

Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Esensi studi kasus ialah mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya dan apa hasilnya. Studi kasus adalah fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*). Meski batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus itu dapat berupa individu, peran kelompok kecil, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa. Kasus dapat pula berupa keputusan, kebijakan, proses atau suatu peristiwa khusus tertentu. Beberapa tipe unit yang dapat diteliti dalam bentuk studi kasus : individu-individu, karakteristik atau atribut dari individu-individu, aksi dan interaksi peninggalan atau artepak perilaku, setting serta peristiwa atau insiden tertentu.

Dalam menopang penelitian dalam karya tulis ini, penulis melakukan pengkajian terhadap literatur dan pelaku sejarah yang berhubungan erat dengan obyek kajian yang penulis kaji. Langkah yang penulis lakukan dengan mengelompokkan bahan yang akan dikaji kepada bahan primer dan skunder.

Bahan hukum primer yang di teliti dan dikaji adalah berbagai dokumen dan arsip yang menjadi sumber utama dalam kebijakan-kebijakan partai, di samping itu melakukan penelusuran langsung kepada pelaku sejarah yang mengambil kebijakan dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Sementara itu, bahan sekunder adalah pustaka-pustaka yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari karya-karya cerdik cendekia tersebut ingin diketahui pendapat mereka tentang politik, utamanya yang berkaitan dengan teori dan ilmu politik. Pendapat mereka ini penting, mengingat perlu penjelasan dalam memahami berbagai sikap dan strategi dalam sebuah partai, sehingga mengambil sikap dalam menghadapi berbagai masalah dalam bermasyarakat dan bernegara.

#### **3.4. Pengumpulan Data Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah pengumpulan data merupakan keniscayaan, karena pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa melakukan pengumpulan data, maka karya tulisnya tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan beberapa tahapan dalam proses pengumpulan data, diantaranya :

*Pertama*, mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan platform Partai Keadilan Sejahtera dan berbagai teori-teori politik yang menjadi rujukan partai..

*Kedua*, mengumpulkan data dari berbagai sumber, terutama data yang menyangkut dengan rencana (*planing*) partai serta kebijakan-kebijakan masa depan yang akan dilakukan oleh partai. Selain data berupa dokumen, penulis juga mengkuilifikasi data kasus yang mencakup peristiwa dan kejadian sebagai data primer.

*Ketiga*, dalam pengumpulan dokumen, penulis menyambangi langsung Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini dilakukan, mengingat diperlukannya penelusuran langsung guna mengetahui tempat dan obyek yang akan dijadikan bahan kajian .

*Keempat*, melakukan wawancara dengan para penentu kebijakan Partai Keadilan Sejahtera, diantaranya Ir. Tifatul Sembiring (Presiden Partai Keadilan Sejahtera), Anis Matta, Lc (Sekjen Partai Keadilan Sejahtera), dan KH. Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera), Dr. Surahman Hidayat (ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera) dan Drs. H. Suharna Surapranata, M.T (ketua Majelis Pertimbangan Pusan Parai Keadilan Sejahtera).. Wawancara ini dilakukan dengan studi kasus bertipe *open ended* yang terfokus pada pendalaman kebijakan dan strategi partai. Pemilihan wawancara bertipe *open ended* dan sekaligus terfokus pada obyek penelitian dilakukan karena tujuan pokok wawancara adalah mendapatkan informasi yang jelas dari ahlinya.

*Kelima*, mengumpulkan bahan pustaka, baik pustaka kontemporer maupun klasik yang membahas tentang politik guna mendukung penelitian ini.

Studi dokumen, studi kasus dan wawancara dalam penelitian yang dilakukan penulis merupakan instrumen utama yang dijadikan alat untuk pengumpulan data. Sejalan dengan itu, sebagai intrumen pendukung, penulis

menggunakan *checklist* (daftar cocok) yang berupa (1) pedoman wawancara yang merupakan garis besar tentang pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk mendalami materi tentang dan mengetahui pandangan pakar politik seputar pragmatisme dan strategi partai dalam menentukan kebijakannya. (2) memuat batasan-batasan untuk mencari data berupa strategi dan kebijakan partai sehingga mengambil sebuah kebijakan yang pragmatis dalam menghadapi agenda politik.

### 3.5. Analisis Data Penelitian

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara bersama-sama dengan pengumpulan data. Karena dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan (obyek data), baik selama atau sesudah selesai. Sugiyono (hal 275, 2006) menyatakan, analisis kualitatif telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian berakhir.

Setelah terkumpul, penulis mengkorelasikan apa yang didapat ketika pengumpulan data sampai kepada membikin konklusi. Hal ini dilakukan guna mengetahui sumber data yang sudah terkumpul, sekaligus menjawab pertanyaan serta permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian tahapan dalam analisa ini sebagai berikut :

*Pertama*, mereduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang ada akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.

*Kedua*, penyajian data (*display data*), langkah selanjutnya yang dilakukan penulis ialah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, dan pengkategorian data.

*Ketiga*, melakukan interpretasi data berdasarkan beberapa pendekatan dan penelitian yang tepat dan akurat. Sehingga akan diperoleh jawaban yang akurat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.



*Keempat*, berdasarkan hasil kerja tahapan sebelumnya, maka dapat diperoleh kejelasan atas permasalahan dalam penelitian. Karenanya dapat ditarik kesimpulan minimal (*conclusion drawing*) yang sifatnya sementara dari beberapa bukti yang telah ditemukan dalam mengumpulkan dan menganalisa data.

*Kelima*, menghubungkan penelitian ini dengan penelitian yang lain, sebagaimana yang bisa ditemukan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan langkah inilah pada gilirannya dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.



## **BAB IV**

### **STUDI ANALISA KEBIJAKAN PRAGMATIS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

#### **4.1. Selang Pandang Partai Keadilan Sejahtera**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

Partai Keadilan Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, Partai Keadilan Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PKS), berdinamis pada pemilu 2004, bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2009 mendatang.

Partai Keadilan Sejahtera adalah kelanjutan dari partai keadilan. Partai keadilan bermula dari gerakan tarbiyyah dan gerakan kultural yang dipelopori anak-anak muda islam. Gerakan yang dibangun bertahun-tahun di mushala-mushala dan masjid kampus kemudian bertransformasi menjadi gerakan politik.

Partai keadilan didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 yang dinyatakan dalam konferensi pers di aula masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta. Kemudian dideklarasikan di halaman masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1998, yang di hadiri oleh 50.000 massa.

Dalam gerakan politiknya, partai keadilan menolak tegas pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh presiden partai keadilan, Nurmahmudi Ismail dalam peresmian DPW partai keadilan Yogyakarta.<sup>17</sup>

Pada tahun 1999, K.H. Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan. Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (*stembus accord*) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905.

Dalam kancah gerakannya, ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan pernah memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta, dan Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positif berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU.<sup>18</sup>

Partai Keadilan menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. PK menunjuk Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il, MSc. sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Selanjutnya ia mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

Partai Keadilan menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok. Pada Munas tersebut, Dr. Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il.

---

<sup>17</sup> [www.pks.or.id](http://www.pks.or.id)

<sup>18</sup> Dilakukannya pada hari Senin, 2 Agustus 1999.

Sehabis lebaran pasca terpilihnya Hidayat Nurwahid sebagai presiden ke 2, Partai Keadilan mengadakan silaturahmi dan halal bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.<sup>19</sup>

Pada tanggal 8 Juni 2002, 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.<sup>20</sup>

Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold*, maka mereka harus mencari solusi bila menginginkan kembali ikut serta dalam pemilihan umum, baik dengan membentuk partai baru, bermetamorfosa menjadi partai lain ataupun bergabung (melebur) dengan partai yang memenuhi *electoral threshold*.

Pada tanggal 17 April 2003, Partai Keadilan mengadakan musyawarah Majelis Syuro XIII yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, musyawarah Majelis Syura ini merekomendasikan untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan metamorfosa dari Partai Keadilan. Kemudian melakukan Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 20 April 2003 di Silang Monas Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.

Departemen Kehakiman Hukum dan Ham, pada tanggal 4 Juni 2003 menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera lulus verifikasi partai, yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi di Dewan Pimpinan

---

<sup>19</sup> [www.pks.or.id](http://www.pks.or.id)

<sup>20</sup> Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat

Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten) di seluruh Indonesia. Dan, pada tanggal 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera telah selesai 100 % melakukan verifikasi tingkat DPW dan DPD di seluruh Indonesia.<sup>21</sup>

Secara resmi Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik Partai Keadilan menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Untuk pertama kalinya, tanggal 20 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera mengadakan musyawarah Majelis Syuro yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, dalam musyawarah ini partai menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.

Tepat tanggal 8 Agustus 2003 DPP PKS mencanangkan program Safari 'Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

Dalam perjalanannya, Partai Keadilan Sejahtera mampu merebut perhatian publik dalam pemilihan umum 2004 dengan mendudukkan kadernya sebanyak 380 kursi parlemen di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Tentu, ini adalah hasil yang baik, karena partai ini diusung oleh anak muda yang tidak memiliki figur-figur senior.<sup>22</sup>

#### 4.2. Platform PKS

Platform kebijakan pembangunan PKS merupakan sebuah strategi yang merefleksikan visi, misi, program dan sikap partai terhadap berbagai persoalan Indonesia. Platform menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai dan akan menjadikan segenap aset Partai di semua sektor kehidupan yaitu sektor ketiga, sektor publik dan sektor swasta bekerja secara terintegrasi, kontinyu, fokus

---

<sup>21</sup> [www.pks.or.id](http://www.pks.or.id)

<sup>22</sup> *Ibid.* lihat pula, [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com)

dan terarah sehingga sumber daya partai yang terbatas dapat dikelola secara baik untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan secara langsung bisa dirasakan oleh para simpatisan, konstituen dan masyarakat pada umumnya.

Platform kebijakan pembangunan PKS dalam berbagai bidang kehidupan yang strategis dipandang penting untuk dua sasaran. *Pertama*, sebagai instrument komunikasi kepada massa konstituen sekaligus sebagai alat untuk meresonsasikan persepsi tentang kehidupan bersama yang diperjuangkan. Sebab platform ini mencerminkan jati diri, isi hati dan kepala PKS, sekaligus sebagai navigasi dalam mengelola Negara dan komitmen yang akan dikerjakan.

Dalam bingkai politik, maka platform adalah proposal yang akan ditawarkan Partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih untuk mendulang suara secara obyektif dan bertanggung jawab. *Kedua*, sasaran yang bersifat internal ke dalam tubuh PKS sebagai institusi dakwah. Platform adalah derivasi sekaligus wahana (*vehicle*) dari ideologi partai. Ini merupakan subyektifitas dakwah, cara pandang dakwah terhadap dunia di sekelilingnya. Platform secara internal merupakan kristalisasi pemahaman akan arah bagaimana Negara dan pengelolaan Negara ke depan seharusnya dilakukan. Dengan demikian, platform tidak lain adalah sekumpulan nilai, harapan dan capain konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang dan pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dengan itu menumbuhkan pemahaman konseptual dalam tubuh institusi dakwah itu sendiri. Dengan platform, masing-masing kader da'i dapat memahami bagaimana gerak langkah, sikap dan arah institusi dakwah bergulir menembus waktu di dalam ruang publik secara obyektif.

Di antaranya ada tiga hal yang dijadikan rumusan dalam platform PKS. Platform ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab PKS dalam perbaikan kehidupan bangsa dan negara, dan sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Kebijakan tersebut sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader

sekaligus komitmen politik PKS. Rumusan-rumusan tersebut tertuang dalam beberapa hal yaitu,<sup>23</sup>

#### 4.2.1. Bidang Politik

Dalam bidang politik arahan dan pedoman yang menjadi dasar ialah, *Pertama*, berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam. PKS bahu membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah.

Pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang bebas agama berdasarkan sekulerisme, yang memisahkan agama dari negara secara murni adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia. Pemikiran tersebut tidak relevan, karena Indonesia adalah Negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat religius, bangsa dan negeri mayoritas Muslim. Indonesia adalah NKRI yang berketuhanan yang Mahaesa.

*Kedua* berkaitan dengan dinamika politik nasional, PKS mendorong agar Indonesia Baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang berekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial. Dengan demikian, muncul stabilitas politik yang diakibatkan oleh kedewasaan elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta tingkat pendidikan politik masyarakat yang memadai.

Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan munculnya kepercayaan berinvestasi, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk memberikan ruang publik yang lebar bagi masyarakat

---

<sup>23</sup> Lihat *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*, Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Cet. I. 2008.

untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan ekspresi diri, serta tegaknya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan pembangunan ekonomi dan membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat.

Bahkan stabilitas juga merupakan syarat bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersebahkan rasa adil, dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tentram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam upaya membangun stabilitas politik bangsa, berbagai persoalan yang dapat memicu destabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik dan etnonasionalisme perlu ditangani secara persuasif, bijaksana dan sikap tegas dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio-kultural secara terperinci.

*Ketiga*, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik di masa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Sejarah perpolitikan tanah air sejak era Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan praktek "Demokrasi Parlemen Multi Partai" memperlihatkan pergerakan sejarah dari sistem liberal-otoriter-liberal menuju sistem demokrasi yang lebih substansial dan stabil. Dalam rangka menumbuhkan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, bercermin dari pengalaman sejarah nasional. PKS berkeyakinan bahwa sistem multi partai sederhana tampak lebih mungkin dikembangkan. Karenanya, penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan "batas ambang" adalah langkah yang rasional dan obyektif.

Indonesia yang bersifat multi etnik dan agama dan masyarakatnya berekspresi dalam berbagai ormas dan orpol, tetap dapat direkat dalam sistem politik nasional tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang muncul untuk



menyuarakan keadilan. Di masa depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, mampu menjangkau calon wakil rakyat yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

*Keempat*, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dengan wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke; dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara; serta dengan jumlah penduduk yang besar maka rentang kendali Indonesia demikian luas. Di sisi lain, pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi yang masih transisional menuntut pematangan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi dalam sisi tertentu merupakan tekanan eksternal bagi Indonesia, apalagi semangat ketidakadilan global yang melekat di dalamnya, merupakan tantangan bagi negara berkembang. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, bahwa sistem ketatanegaraannya mestilah stabil, mantap serta dinamis.

PKS berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan menyerahkan fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, proteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi-fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.

*Kelima*, berkaitan dengan tata hubungan pemerintah secara vertikal serta otonomi daerah, maka PKS berkeyakinan bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM dan peningkatan kapasitas. PKS memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi oleh pemerintahan pusat. Namun, tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas

melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, propinsi dan daerah.

PKS menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghadirkan konflik otoritas dan menyebarkan virus korupsi, kolusi dan nepotisme kepada oknum-oknum daerah yang menyengsarakan nasib rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting.

*Keenam*, berkaitan dengan birokrasi, PKS berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tatakelola pemerintahan yang baik, rapih dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cermin akan tubuh bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara. Tata pemerintahan yang baik, diyakini menjadi prasyarat kunci bagi tegaknya pemerintahan yang bersih-peduli-profesional harus menyatu dalam tubuh pengelolaan birokrasi, yakni: tata pemerintahan yang berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, serta mendorong partisipasi publik.

*Ketujuh*, PKS berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, "Hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor". Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakkan hukum tersebut. Untuk itu, bukti dan contoh para kader PKS di lapangan legislatif dan eksekutif bentuk kongkret perjuangannya.

#### **4.2.2. Bidang Perekonomian**

Dalam bidang ekonomi PKS menyakini bahwa, *pertama*, kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan. Mengingat penduduk miskin terutama adalah para petani dan nelayan yang secara umum tinggal di pedesaan, maka perhatian

pemerintah terhadap sektor pertanian mesti mendapat porsi yang utama. Kurangnya perhatian dan lemahnya kebijakan pada sektor pertanian merupakan paradoks, mengingat potensi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sangat besar. Untuk itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan bersamaan dengan pelipatgandaan produktivitas sektor pertanian.

*Kedua*, ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi rawan terhadap gejolak sosial. Bukan hanya pemerataan yang diidamkan hal ini mengakibatkan menjadi sulit tercapai, tetapi juga munculnya inefisiensi dan parsialitas pembangunan sektoral. PKS berkeyakinan, bahwa pemerataan pendapatan hanya dapat diatasi, apabila koordinasi lintas sektoral dikelola secara baik dengan membuat keterkaitan input-onput antara sektor yang satu dengan yang lain dalam kerangka kerja integratif. Keterkaitan, baik ke depan, maupun ke belakang dalam setiap sektor, terjadi dalam sebuah harmoni yang terintegrasi akan memunculkan kekuatan sinergi pembangunan, dan menghasilkan pemerataan pendapat.

*Ketiga*, tekanan global dan rendahnya daya saing produk industri nasional tidak akan dapat diselesaikan sebelum disadari, bahwa hakikat persaingan di era global sarat dengan informasi yang asimetrik. Berbagai upaya harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku industri dalam mengelola informasi, bukan hanya informasi berkaitan dengan produksi, tetapi juga perilaku pasar di tingkat global. PKS berkeyakinan, bahwa pengembangan SDM yang berkualitas dan penguasaan teknologi secara kemampuan inovasi melalui penelitian dan pengembangan adalah kunci peningkatan daya saing industri nasional. Rendahnya daya saing industri nasional juga diakibatkan oleh lambatnya perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dasar. Tersendatnya reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi turut menentukan iklim investasi nasional. Reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi merupakan agenda utama di luar kebijakan ekonomi yang harus dituntaskan untuk mengijilangkan praktek perburuan rente (*rent*

*seeking*) yang telah mengakar dalam dunia bisnis nasional yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

*Keempat*, melaju cepatnya keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Padahal semestinya, sektor keuangan adalah darah segar bagi tumbuhnya sektor riil ekonomi yang menggerakkan roda-roda industri barang dan jasa. Untuk memecah persoalan ini, maka PKS menyakini bahwa perbaikan sektor riil hanya bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan terhadap tindakan spekulatif di sektor keuangan, dan menciptakan sistem yang mampu mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor riil untuk meningkatkan investasi langsung. Berbagai upaya perbaikan infrastruktur pembangunan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, termasuk iklim investasi yang kondusif adalah langkah yang mutlak dilakukan untuk mendorong masuknya investasi asing langsung di Indonesia untuk menggerakkan sektor riil.

*Kelima*, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan selama ini telah menuai bencana bagi rakyat. Karenanya PKS menyakini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan. Berbagai upaya konservasi perlu terus dilakukan. Upaya untuk mereduksi kerusakan alam hanya dapat direalisasikan apabila kita meningkatkan kemampuan SDM dan penguasaan iptek, sehingga mampu melakukan proses produksi yang bernilai tambah tinggi dengan meminimalisir penggunaan input sumber daya alam. Proses teknologi yang bersih dan hemat sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi menjadi pilihan penting pembangunan industri kita.

*Keenam*, PKS memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh. PKS berkomitmen untuk mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional dan mengawal jalannya proses reformasi

dari membelokan arah untuk kepentingan kelompok tertentu dan ketamakan pemburu rente ekonomi. PKS berpendapat, bahwa stabilitas makro ekonomi adalah kondisi penting untuk perekonomian, namun tidak mencukupi jika tidak diarahkan untuk mendorong dinamika sektor riil. Stabilitas makro ekonomi harus berakhir dengan bergerakinya sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Karena itu, PKS memandang bahwa stabilitas makro ekonomi harus dibingkai dengan komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan analisis permasalahan ekonomi nasional yang ada, maka PKS menetapkan platform perekonomiannya di atas landasan ekonomi egaliter dengan misi untuk, 1) mengentaskan kemiskinan. 2) mengurangi pengangguran, dan 3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Guna mencapai misi tersebut, telah ditetapkan strategi berupa, 1) pemerataan pendapatan. 2) pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan 3) pembangunan berkesinambungan. Selanjutnya strategi ini dijabarkan ke dalam langkah-langkah utama dan langkah-langkah pendukung. Langkah-langkah utama adalah, 1) melipatgandakan pendapatan petani dan nelayan, 2) meningkatkan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi, dan 3) membangun sektor-sektor yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*.

PKS memandang bahwa pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan adalah masalah utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Masalah pengentasan kemiskinan sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor ini menjadi prioritas utama platform pembangunan ekonomi PKS dengan *langkah utama pertama*, yaitu melipatgandakan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan. Langkah ini dilaksanakan melalui program utama modernisasi sektor pertanian dan kelautan, serta relokasi hingga separoh penduduk tani ke sektor industri dan jasa berbasis agro melalui pemberdayaan wirausaha dan program *outsourcing bottom of pyramid*.

*Langkah utama kedua* adalah untuk mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi

nasional dengan titik berat pada koordinasi lintas sektor lintas wilayah dengan sasaran untuk meningkatkan efek propaganda sektor/wilayah yang kaya sumber daya alam terhadap sektor/wilayah lain melalui upaya peningkatan nilai tambah proses ekonomi di dalam negeri dengan mengandalkan SDM yang berkualitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang memadai. Dengan koordinasi lintas sektoral dan wilayah yang baik diharapkan bisa tercapai pemerataan dan pertumbuhan secara bersamaan. Skema insentif/disinsentif diterapkan untuk merubah arus utama barang dan jasa nasional yang terlalu tergantung pada luar menuju pada pola rantai pemasok yang kuat di dalam negeri dengan mengoptimalkan peran pemasok komponen dan litbang/universitas dalam negeri untuk mencapai tingkat kemandirian bangsa. Insentif utama diberikan untuk mendorong terbangunnya industri pemasok komponen dalam negeri yang kuat dan peran lembaga litbang/universitas sebagai pemasok teknologi dalam negeri yang optimal. Disinsentif terutama diterapkan pada impor barang jadi dan barang setengah jadi yang dibiayai oleh APBN dan APBD.

*Langkah utama* ketiga ialah membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang belum sepenuhnya digali, serta pasar dalam negeri yang sangat besar. Subsektor kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan adalah sektor-sektor yang mempunyai potensi sangat besar bagi Indonesia untuk digali dalam membangun industri berbasis sumber daya alam dengan nilai tambah dan daya saing tinggi. Disamping itu, di antara penduduk Indonesia yang demikian besar terdapat SDM yang berkualitas sangat tinggi dengan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang tinggi yang mampu bersaing di bidang-bidang yang paling *frontier* di dunia yang dapat diandalkan untuk membangun sektor ekonomi berbasis *knowledge*. Bidang-bidang yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dalam kategori ini adalah sektor bioenergi, farmasi, bioteknologi, telematika, peralatan kedokteran dan instrumentasi. Diharapkan bidang-bidang ini akan mampu mengangkat martabat bangsa dan juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kunci keberhasilan ketiga langkah tersebut terletak pada kebijakan pemerintah yang menjamin terjadinya koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang merupakan motor utama daya saing ekonomi nasional.

#### 4.2.3. Bidang Sosial Budaya

Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dan multijalur. Tak cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi atau didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka. Proses pembangunan dalam wujud apapun, harus berpusat pada manusia dan warga masyarakat sebagai subyek utama. Karenanya misi yang diemban PKS dalam bidang sosial budaya adalah, "Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dan kemajuan budaya demi mengangkat martabat bangsa". Dalam bahasa yang lebih gamlang dapat diterjemahkan sebagai, "Menghapus kebodohan, kekerasan sosial, dan keterbelakangan budaya". Sebab, kita memandang kebodohan, kekerasan, serta keterbelakangan sebagai musuh sosial seluruh bangsa.

Demi mendekatkan realitas dengan visi yang dicita-citakan, maka langkah utama PKS adalah :

Pertama, memastikan kebutuhan dasar (*basic need*) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok warga acap terbongkar adanya mafia dan spekulasi barang yang mengontrol harga di pasar. PKS menegaskan perlunya infrastruktur pelayanan pemerintah diperbaiki agar sanggup menghadapi dan melawan jaringan spekulasi yang telah merugikan masyarakat banyak. Jangan sampai kepentingan orang banyak dikorbankan demi memenuhi keserakahan segelintir spekulasi.

Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PKS mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan. Pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, bahkan diupayakan gratis untuk

fasilitas kewajiban belajar untuk masa 9-12 tahun hingga tingkat sekolah menengah atas.

Penetapan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari anggaran negara sesuai ketentuan konstitusi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan aspek-aspek strategis. Perbaikan kurikulum merupakan salah satu prioritas agar peningkatan pengetahuan sejalan dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar lapangan kerja.

*Ketiga*, terwujudnya status kesehatan paripurna bagi semua, sehingga dapat membangun bangsa dan negara dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Kesehatan paripurna dengan visi sehat badan, mental spritual dan sosial yang dimulai dengan sehat individu, sehat keluarga, sehat masyarakat, dan sehat bangsa dan negara. Dengan demikian, kesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi. Sehingga atas dasar ini, maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas dan berkesinambungan bersama seluruh elemen bangsa menuju derajat kesehatan yang lebih baik. Secara umum pembangunan kesehatan perlu difokuskan pada upaya mengimplementasikan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dengan mengembangkan sistem pendukungnya secara berkualitas, antara lain,: peningkatan kuota anggaran kesehatan, perbaikan sistem pembiayaan kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan profesional yang berakhlakul karimah, perbaikan sistem manajemen kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, serta kefarmasian kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses bagi masyarakat, peningkatan kualitas ilmu oengetahuan dan teknologi kesehatan, serta kebijakan kesehatan yang berkeadilan.

*Keempat*, penanaman nilai kemandirian dan kesetiakawanan sosial. Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (*character building*) yang tidak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orag lain. Karena itu, perlu dibangun kepercayaan diri baru dan



nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan. Jiwa kemandirian yang ditanamkan sejak kecil hingga masa dewasa akan membuat setiap individu mampu menyelesaikan masalah di lingkungan masing-masing, tanpa menunggu intervensi luar. Namun, semangat kemandirian yang terus digalakkan itu tidak boleh mengarah pada gejala individualisme dan egoisme, sebab akan merusak modal sosial yang telah ditanam. Kemandirian individu dibangun di atas rasa kesetiakawanan sosial yang harus terus diperluas, sehingga membentuk komunitas yang mencintai kebajikan.

*Kelima*, gerakan kebudayaan yang progresif. PKS menilai, kebudayaan dalam tataran konseptual-akademik sudah saatnya untuk dimobilisasi melalui gerakan baru yang progresif dalam hal pengkaderan seniman-budayawan yang tercerahkan, pembentukan komunitas budaya di wilayah kota dan desa, serta perakitan jaringan kebudayaan lokal, nasional dan global. Dengan demikian kebudayaan baru Indonesia sangat menghargai warisan budaya lokal/tradisional serta bersikap selektif/adaptif terhadap arus budaya global/modern.

#### 4.2.4. Kebijakan Partai

Dalam menjalankan program partai, Partai Keadilan Sejahtera memiliki kebijakan. Secara umum prinsip kebijakan dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Da'wah. Sedangkan da'wah yang diyakini Partai Keadilan Sejahtera adalah *da'wah rabbaniyah* yang *rahmatan lil'alam*, yaitu da'wah yang membimbing manusia mengenal Tuhannya dan da'wah yang ditujukan kepada seluruh ummat manusia yang membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapinya. Ia adalah da'wah yang menuju persaudaraan yang adil di kalangan ummat manusia, jauh dari bentuk-bentuk rasialisme atau fanatisme kesukuan, ras, atau etnisitas.

Atas dasar itu maka da'wah menjadi poros utama seluruh gerak partai. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak da'wah telah menjadi dasar

dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya. Kebijakan tersebut ialah :

### **1. *Al-Syumuliyah* (Lengkap dan Integral)**

Sesuai dengan karakteristik da'wah Islam yang syamil, maka setiap kebijakan Partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

### **2. *Al-Ishlah* (Reformatif)**

Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partai selalu berorientasi pada perbaikan (ishlah), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. dalam rangka meninggikan kalimat Allah, memenangkan syari'at-Nya, dan menegakkan daulah-Nya.

### **3. *Al-Syar'iyah* (Konstitusional)**

Syari'ah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain (*hablun min al-nas*). Menjunjung tinggi syari'ah, ketundukan, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Komitmen itu wujud dalam bentuk keteguhan (*al-istimsak*) kepada al-haq, bulat hati dan percaya penuh kepada Islam sebagai ajaran yang lurus dan komprehensif yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan tetap menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Demi terwujudnya makna kemerdekaan sejati semua peraturan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjadi dasar konstitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. Sebab kemandirian refrensi syari'at pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam merealisasikan amanah dan melawan kedhaliman.

#### **4. Al-Wasathiyah (Moderat)**

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasatha*). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (*wasathiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. *Al-wasathiyah* yang telah menjadi ciri Islam baik dalam aspek-aspek *nazhariyah* (teoritis) dan *'amaliyah* (operasional) atau aspek tarbiyah (pendidikan) dan *tasyri'iyah* (perundang-undangan) harus merefleksi pada aspek ideologi ataupun *tashawwur* (persepsi), ibadah yang bersifat ritual, akhlak, adab (*tatakrama*), *tasyri'* dan dalam semua kebijakan, program, dan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan pula dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksageritas kezhaliman dan kebathilan.

#### **5. Al-Istiqamah (Komit dan Konsisten)**

Oleh sebab berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim maka komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekuensinya seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasional Partai harus istiqamah (taat asas) pada "hukum transenden" yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dan dalam keseluruhan proses sejarah (ayat-ayat kawaniyat-Nya), dalam Kitab-kitab-Nya (ayat-ayat qawliyat-Nya) dan dalam sunnah Rasulullah SAW, dalam konsensus ummat, serta dalam elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam Risalah orisinal (al-Qur'an dan al-Sunnah). Konsistensi menuntut kontinuitas (*al-istimrar*) dalam gerakan dalam arti adanya kesinambungan antara kebijakan dan program sebelumnya.

#### **6. Al-Numuw wa al-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang)**

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitasnya yang orisinal. Maka prinsip *al-numuw wa al-tathawwur* (pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal) harus menjadi prinsip gerakannya

dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu Partai dalam kebijakan, program dan langkah-langkah operasionalnya harus tetap konsern kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan eksalarasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

#### **7. *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)**

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fithrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (*tadarruj dan tawazun*) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukung nya ataupun kiprah kolektifnya.

#### **8. *Al-Awlawiyat wa Al-Mashlahah* (Skala Prioritas dan Prioritas Pemanfaatan)**

Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip *al-awlawiyat* dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip *al-awlawiyat* dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya *mashlahah ummah* menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan,

program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap konsern terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan prioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

#### **9. *Al Hulul* (Solusi)**

Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan ihsan dan itqon (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

#### **10. *Al-Mustaqbaliyah* (Orientasi masa depan)**

Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak menge nyamping kan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

#### **11. *Al-'Alamiyah* (Bagian dari da'wah sedunia)**

Pada hakikatnya gerakan da'wah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat 'alamiyah (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Hal itu telah menjadi sunnatudda'wah. Ia merupakan aktivitas yang tidak

kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Kenyataan itu menegaskan bahwa eksistensi da'wah kita merupakan bagian dari da'wah 'alamiyah. Oleh sebab itu prinsip kebijakan da'wah kita tidak lepas dari kebijakan dan gerakan da'wah sedunia. Adalah suatu kemestian setiap kebijakan yang diambil, program yang dicanangkan, dan langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan kebijakan da'wah yang bersifat 'alami dan tunduk pada sunnatudda'wah tersebut dengan tidak melikuidasi persoalan khas yang dihadapi di masing-masing wilayah.<sup>24</sup>

### 4.3. Dakwah Politik

Tidak ada dikotomi antara dan agama. Memisahkan agama dari politik sama dengan menghancurkan sebagian hakikat agama. Islam sebagai sistem hidup yang universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, qaidah yang lurus dan ibadah yang benar.

Inilah sebuah penegasan, bahwa Islam memiliki kaca mata pandang dalam memahami realitas politik, yang menegaskan bahwa Islam adalah ajaran universal, mencakup seluruh aspek kehidupan dengan berbagai dimensinya yang kompleks.

Ajaran Islam memberikan implikasi yang luas jika disimak ke dalam perspektif sosiologis, yaitu tidak adanya pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama ajaran Islam, dengan tegas menolak keterpisahan antara urusan dunia dan akhirat. Marcel A Boisard (hal 219, 1980) menegaskan revolusi berdasarkan Al-Qur'an dengan sendirinya menolak keterpisahan antara aspek sakral dengan aspek profan dalam tata susunan sistem sosial. Tentu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap Islam sebagai ajaran jika muncul rumusan yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang bersifat temporal.

---

<sup>24</sup> Lihat, [www.pks.or.id](http://www.pks.or.id)

Ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, akan ditransformasikan dengan berbagai cara untuk dirasakan manfaatnya oleh segenap umat manusia. Transformasi inilah yang dinamakan dengan dakwah. Dakwah Islam pada hakekatnya merupakan aktifitasnya terencana untuk mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliyyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (*syakhshiyah islamiyyah*) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Sebab terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu, pribadi-pribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah (*syakhshiyah da'iyah*) sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial.

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah saat di Madinah –jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern- tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem politik. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan-tujuannya, motif-motifnya dan fundamental maknawi tempat sistem berpijak.

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter sekaligus karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Para orientalis melihat dengan kaca mata obyketif, seperti pendapat Fitzgerald yang menyatakan bahwa Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). C.A. Nallino meegaskan, bahwa Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama (*a religion*) dan negara (*a state*) dan batas-batas teritorial negara yang dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya.<sup>25</sup>

Dikaitkan dengan situasi makro politik Islam, paparan diatas adalah *common sense*. Ini karena keterkaitan antara Islam dan politik yang merupakan keyakinan umum di kalangan tokoh dan pemimpin Islam.

---

<sup>25</sup> Lihat Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta; 2001), hal 6.

Amin Rais -politikus sekaligus akademisi- (hal 27, 1999) menyatakan bahwa politik sebagai sesuatu yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan atau yang berhubungan dengan cara dan proses pengelolaan pemerintah suatu negara. Dari sini kemudian muncul sebuah rumusan bahwa politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik sepenuhnya dengan nilai-nilai Islam. Politik tak dapat memalingkan dirinya sebagai alat dakwah, serta semakin jauh dari kerangka sekularisme yang memisahkan keduanya. Tujuan yang diletakkan oleh politik semacam ini bukanlah kekuasaan demi kekuasaan atau pencapaian suatu kepentingan itu sendiri. Kekuasaan, pengaruh, kepentingan, posisi politik dan sebagainya bukanlah yang hendak dicapai.

Seluruh ontologi tentang politik ini terkait erat dengan eksistensi partai politik. Partai politik adalah sekelompok warga negara yang mempunyai tujuan dan pemikiran sama, dan secara kolektif mengorganisasi diri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang juga sama dengan cara yang menurut mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Dan diantara mereka ada yang berusaha meraih kedudukan dan kekuasaan politik dalam lingkungan masyarakatnya.<sup>26</sup>

Prinsip bahwa politik sebagai media dakwah, hal ini tidak terlepas dari teori politik yang didefinisikan oleh pakar politik. Sigmund Neumann dalam arktikelnya berjudul *Toward A Comparative Study of Political Parties* menyatakan bahwa politik adalah 'organisasi artikulatif yang terdiri dari agen-agen politik yang aktif dalam masyarakat, yang mempunyai perhatian untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dan yang berkopetisi untuk mendapat dukungan sebanyak mungkin dari kelompok lain atau dari kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Maka partai politik merupakan penghubung yang mensinergikan seluruh kekuatan sosial maupun sgenap ideologi dengan lembaga-lembga pemerintah yang resmi serta mengaitkan dengan aksi politik secara lebih luas dalam kehidupan msyarakat.<sup>27</sup>

Dengan demikian, menurut Michael G Rpskin, dkk (hal 202, 1994), bahwa partai politik mempunyai peran dan fungsi untuk menghubungkan pemerintah

<sup>26</sup> Lihat, Abdul Wahab Al-Khayali, *Masu'ah as-Siyasah, bab Hizb As-Siyasi*, Beirut 1981.

<sup>27</sup> Sigmund Neumann, *Toward A Comparative Study of Political Parties*, dalam Harry Eckstein and David Apter (ed.) *Comparative Politics A Reader*, The Free Press, New York, 1963, hal 352.



dengan rakyatnya (*a bridge between people and government*). Fungsi mediator ini memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan pemerintah mau mendengarnya. Sebab tanpa partai politik keinginan warga negara hanya berdiri sendiri dan tidak diperhatikan.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan kata lain, partai politik yang tidak berkuasa bertindak sebagai oposisi dalam rangka untuk membuat check and balances terhadap kekuatan pemerintah. Dalam negara demokrasi fungsi partai politik dalam posisi sebagai oposisi sangat diperlukan.

Fungsi kedua ini dalam bahasa politik profetik adalah menunaikan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam Islam, tugas ini merupakan keharusan bagi setiap individu (*fardhu 'ain*) dalam pelaksanaan tugas tersebut Islam menyarankan dalam bentuk kejamyahan (*well organised*). Sebab, jika *amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan secara sendiri-sendiri tentu saja tidak cukup berpengaruh, karena tidak memiliki kekuatan.

Di sinilah signifikansi mendirikan partai dalam konstek dakwah sebagai sarana untuk melaksanakan kontrol, mengoreksi dan menghadapi kezhaliman kekuasaan, mengembalikan ke jalan yang benar atau menggantikannya untuk di duduki orang lain yang lebih amanah dan jujur. Jadi, institusi partailah yang akan mampu secara efektif melaksanakan tugas menasehati serta membawa misi *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dari fungsi di atas menjadi jelas bahwa agama dan politik secara tegas tidak dapat dipisahkan. Dimensi lain yang menyebabkan keterkaitan antara keduanya sangat erat, karena dakwah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali dalam partai politik.

Untuk menghadapi ini semua, dakwah Islam harus mencakup semua dimensi kehidupan masyarakat perlu juga menggunakan sarana yang ada. Dari pemahaman ini dapat dikatakan, bahwa partai politik merupakan bagian dari dakwah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Lihat, Aay Muhamad Furkon, *Pengaruh Pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun Terhadap Gerakan Politik Islam Indonesia (1980-2000); Studi Kasus Partai Keadilan*.(Jakarta; 2003), hal 230.

Sayyid Quthub (hal 119, 1990) mengutarakan tentang keterkaitan Islam dan politik, sekalipun tidak menjelaskan secara mendetail. Islam memiliki karakteristik universal hal ini bisa dilihat bahwa dalam Islam ada konsepsi yang bersifat vertikal yaitu tentang hakikat uluhiyyah, dan bagaimana berhubungan secara ubudiyah. Demikian juga dengan konsepsi yang bersifat horizontal atau muamalah mengenai hubungan manusia satu dengan yang lainnya.

Pentingnya karakteristik keuniversalan ini tidak saja untuk meluruskan keimanan, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan kehidupan ke arah kesempurnaan. Dengan kata lain, semua tatanan masyarakat yang dibuat dalam rangka ibadah dan mengesakan keulohiyahan Allah SWT.<sup>29</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi lebih tegas dalam menyatakan keterkaitan Islam dan politik (hal 97, 2008), Islam yang benar pasti berpolitik. Jika Islam dipisahkan dari politik, berarti bukan Islam tetapi agama lain, seperti Budha, Nasrani dan yang lainnya. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan pendapatnya tersebut dengan didukung dua alasan. *Pertama*, Islam memiliki sikap yang jelas dan hukum yang gamblang dalam menghadapi berbagai persoalan yang masuk dalam wilayah politik. Islam bukan hanya berisi akidah ketuhanan dan syiar ibadah saja. Islam mencakup akidah, ibadah, dan akhlak serta syariat yang komprehensif. Dengan kata lain, Islam adalah ajaran hidup sempurna yang berisi tentang dasar-dasar yang sengaja ditetapkan, kaidah yang diciptakan, syariat yang ditentukan, ajaran yang diciptakan, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, urusan rumah tangga, sosial, dasar-dasar negara ataupun hubungan internasional. Keyakinan tauhid pada dasarnya merupakan revolusi kebebasan, persamaan dan persaudaraan manusia. Dengan demikian manusia tidak akan menganggap siapapun selain Allah sebagai Tuhan dan menghapus segala jenis pemujaan manusia kepada sesama manusia. Oleh karena itu, Rasulullah yang mulia mengakhiri surat-suratnya yang dikirimkan kepada raja-raja ahli kitab dengan menulis surat Ali Imran,

*"Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita*

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal 140.

*sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Q.S. Ali Imran [3] : 64)*

Inilah rahasia mengapa kaum musyrikin dan para petinggi penduduk Makkah tidak bertopang dagu sejak hari pertama Islam berdakwah dengan mengusung syiar 'tidak ada tuhan selain Allah' di tempat tersebut. Mereka tahu ada apa di belakang semua itu dan perubahan apa yang akan dilakukan oleh Islam, baik dalam kehidupan sosial, politik dan agama.

Kedua, muslim harus berkepribadian politis. Artinya, seorang muslim pasti memiliki unsur politis, kecuali jika pemahaman dan pengamalannya terhadap agama salah. Islam meletakkan kewajiban bagi setiap muslim berupa kewajiban *ma'ruf nahi munkar*. Atau dengan kata lain memberi nasehat kepada para pemimpin maupun masyarakat luas. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk melawan kerusakan internal dan menganggap suatu perlawanan yang paling berat dibanding dengan perlawanan eksternal. Saat ditanya tentang jihad yang paling utama, beliau menjawab, "*Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim.*"<sup>30</sup>

Di samping alasan tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan (2008) bahwa politik memiliki kemaslahatan dan pada dasarnya, ajaran agama memiliki tujuan-tujuan agama secara global. Hal ini dapat dicontohkan oleh sahabat Umar bin Al-Khaththab yang mengesyampingkan beberapa dalil nash demi mencapai berbagai kepentingan bagi kaum muslimin.

#### **4.3.1. Partai Dakwah**

Langkah yang dilakukan oleh institusi apapun jika memiliki fungsi untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi selanjutnya adalah termasuk partai politik. Begitu pula dakwah yang menggunakan sarana politik

---

<sup>30</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam kitabnya *Al-Musnad* nomor 11035. Menurut para peneliti hadis, kedudukan hadis ini adalah *hasan li ghairih*, yang termasuk kategori hadis *shahih*. Selain oleh imam Ahmad, hadis ini diriwayatkan pula oleh imam Abu Dawud dalam kitab *sunannya* nomor 2174.

sebagai media untuk memberikan norma dan nilai tersebut. Miriam Budiharjo (hal 18, 1998) mengutarakan, sosialisasi politik adalah proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses itu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Tidak hanya itu, sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berpikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan partai.

Pola inilah yang menurut Partai Keadilan Sejahtera sebagai grand strategi untuk memperjuangkan cita-citanya terwujud. Dalam Islam pola ini dikenal dengan proses dakwah. Dakwah pada hakekatnya merupakan aktifitasnya terencana untuk mentransformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliyyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (*syakhshiyah islamiyyah*) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Sebab terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu, pribadi-pribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban amanah dakwah (*syakhshiyah da'iyah*) sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial.<sup>31</sup>

Dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu gerakan dakwah yang menyeluruh (*dakwah syamilah*), dakwah yang mampu mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit. Kekuatan utama Partai Dakwah adalah para kader dakwah itu sendiri. Dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang kemampuan dan kemahiran yang saling bertaut memberdayakan umat. Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan barisan, kesamaan fikrah, kesatuan gerak dan langkah dan kejelasan visi dan misi yang diembannya melalui suatu oskestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah.

---

<sup>31</sup> MPP Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, 2008, hal 36.

Strategi Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah (*khuthuth 'aridhah*) dalam transformasi bangsa, adalah gerakan kultural (*strategi mobilisasi horizontal/ta'biah al-afaqiyah*) dan gerakan struktural (*strategi mobilitas vertikal/ ta'biah al-amudiyah*).<sup>32</sup> Mobilisasi horizontal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islami. Sedangkan Mobilisasi vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi *mashadirul qarar* (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik .

Gerakan kultural (strategi mobilisasi horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, maka kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan/ormas, dan berbagai lembaga/organisasi lainnya, melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara bottom-up. Kader Partai Keadilan Sejahtera akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya, dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat.

Dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dimungkinkan terbangunnya aliansi strategis antara Partai Dakwah dengan simpul-simpul kepemimpinan dan kantong-kantong kultural masyarakat (*mashadirul quwwah*) sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang diberikan masyarakat kepada Partai Dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 37.

Gerakan struktural adalah penyebaran kader ke dalam lembaga legislatif, yudikatif dan sektor-sektor lain dalam kerangka melayani, membangun dan memimpin bangsa, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tujuannya adalah untuk berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top-down* digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.

Dalam menjalankan gerakan struktural, dengan dasar kesamaan falsafah atau platform, dimungkinkan terbangunnya *strategic partnership* antara Partai dakwah dengan lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan (*mashahidur qoror*), sehingga terbangun suatu lapisan pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang membela rakyat.<sup>33</sup>

*Grand Strategy* transformasi bangsa yang diusung Partai Keadilan Sejahtera ini tidak lain dari kombinasi antara gerakan kultural dengan struktural, kombinasi antara perubahan yang bersifat *bottom-up* dengan *top-down* yang merupakan ciri khas Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai dakwah. *Grand Strategy* transformasi bangsa Partai Keadilan Sejahtera ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan (sektor publik, sektor swasta, dan sektor ketiga) yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi, dengan kekuatan integritas moral-religijs dan kualitas-profesional. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.

Terdapat target yang dijadikan sasaran dakwah agar diraih apa yang dicitatakan. Guna mewujudkan hal itu, partai memobilisasi kader ke berbagai pusat kekuatan dan kekuasaan dalam rangka mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 39

dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, ada tiga tahap dalam strategi mobilitas, yaitu: *Pertama*, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju pusat kekuatan dan kebijakan. *Kedua*, penapakan karir kader dakwah dalam organisasi/lembaga tersebut. *Ketiga*, berperan dalam mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan manhaj Islam.<sup>34</sup>

Di dalam negara terdapat tiga jenis organisasi/lembaga yang menjalankan fungsi dari seluruh bidang kehidupan, yaitu organisasi pemerintahan (sektor publik), korporasi swasta (sektor privat) dan organisasi kemasyarakatan (LSM/sektor ke tiga). Dalam kegiatannya setiap individu merupakan bagian dari organisasi/lembaga tersebut, atau berada pada dua sektor atau bahkan ketiganya. Mobilitas kader perlu diarahkan ke berbagai sektor kehidupan, kemudian menapaki kurva karir dalam sektor yang digeluti dan bergerak secara vertikal. Sesuai dengan kemampuan, kecenderungan, dan kesempatan yang tersedia.

Sektor Publik, Organisasi sektor pemerintahan bersemangat dalam pelayanan kepada publik, seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Pada hakekatnya, organisasi sektor publik dibentuk melalui kontrak sosial, di mana masyarakat memberikan mandat kepada sekelompok orang sebagai bagian dari mereka untuk mengatur, mengelola kebijakan publik, sebagai juri untuk mencegah diskriminasi, mencegah penindasan antara satu orang atau kelompok dalam masyarakat kepada orang atau kelompok lain, serta mempromosikan ikatan sosial di antara mereka. Dalam negara modern, organisasi sektor ini dibentuk melalui kontrak sosial yang terbuka dan demokratis dalam proses politik. Presiden, menteri dan birokrat negara adalah aparat negara dalam sektor publik. Mereka mendapat mandat dari rakyat dalam suatu periode tertentu untuk melaksanakan layanan publik kepada mereka. Penyebaran kader dakwah sebagai gerakan struktural ke lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dimaksudkan dalam kerangka partisipasi dalam transformasi bangsa melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 40.





Tujuannya untuk berkontribusi dalam membangun sistem, kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top-down* digunakan sebagai pedoman transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.<sup>35</sup>

Sektor Swasta (*private sector*). Organisasi di sektor swasta adalah organisasi sektor kehidupan masyarakat yang semangatnya mencari keuntungan, yang bekerja dalam mekanisme pasar. Karenanya motif yang dikembangkan dalam sektor ini adalah motif ekonomi. Ukuran-ukuran yang ada serta nilai penting yang dianut adalah efisiensi dan produktivitas yang bermuara pada keuntungan material. Sebagian besar masyarakat suatu negara bergerak di sektor ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup diri mereka secara ekonomi menuju kemandirian. Ini adalah sunatullah, karena setiap individu mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Penyebaran kader ke sektor ekonomi, pada prinsipnya adalah perjuangan menuju kemandirian ekonomi yang akhirnya memunculkan kekuatan ekonomi bangsa. Kekuatan ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik dalam perumusan kebijakan publik..<sup>36</sup>

#### 4.3.2. Ideologi Partai

PKS yang syarat dengan nilai-nilai ajaran Islam, dalam Falsafah Dasar Perjuangannya disebutkan bahwa Islam sebagai akar ideologi dan sekaligus menjadi ideologi alternatif tatanan dunia.<sup>37</sup> Gerakan Islam yang memperjuangkan Islam menjadi ideologi politik dan lebih praktis ke dalam institusi politik kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa Islam selain agama juga merupakan ideologi politik (*Islam as much a political ideology as religion*), (lihat Abdul Hakim, hal iv, 1993).

Achmad Jainuri menjelaskan (hal 57, 2000), ideologi dapat memuat seperangkat doktrin dan keyakinan yang dirumuskan dalam maksud dan tujuan gerakan. Di dalamnya terdapat seperangkat kritik terhadap tatanan kehidupan dan ingin dirubahnya, seperangkat doktrin untuk membenarkan tujuan yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 42.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>37</sup> *ibid*, hlm 408.

ingin dicapai dan seperangkat keyakinan bagi program yang akan dilaksanakan.

Dalam konteks ini, PKS menjadikan Islam sebagai ideologi sebagaimana tertuang dalam rumusan Falsafah Dasar Perjuangan PKS jalan keadilan menuju kesejahteraan. PKS sebagai entitas politik nasional secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya.

Ideologi diartikan sebagai sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial politik. Ia menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasikan secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau kelompok mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala model pencapaiannya.

Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan dan mampu diyakini menyelesaikan problematika kehidupan. Itulah sebabnya Islam dikukuhkan sebagai sumber dan akar ideologi yang memberikan konsep yang unik dan komprehensif tentang manusia dalam seluruh dimensinya. Disamping sebagai akar ideologi, juga merupakan keharusan teologis, sosiologis, politik dan sekaligus menjadi ideologi alternatif tatanan dunia. Keonsekuensinya dilakukan internalisasi ideologi (proses ideologisas) dan obyektifikasi Islam melalui proses jihad dan niat dalam arti luas membentuk kepribadian Islam berwatak moderat (*wasathiyyah*) baik dalam aspek teoritis (*nazhariyyah*) maupun operasional (*amaliyah*).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal 408-409.

Sagap berpendapat (hal 143, 2008), bahwa keidologian Islam dalam PKS setidaknya dapat tersambungkan dengan apa yang disebut dengan salafiah. Kebangkitan salafiyah menunjukkan dua kecendrungan, yaitu gerakan salafiyah akidah (dakwah) dan salafiah politi. PKS termasuk dari gerakan model yang terakhir. Salafiah politik sebagaimana dikenalkan Yusuf Al-Qaradhawi ialah gerakan Islam yang bercorak salafi yang lebih menaruh pada persoalan-persoalan politik daripada akidah. Salafiah politik ini dapat disamakan dengan kelompok 'Islam Politi' atau 'aktivisme Islam Politik' yang langsung terjun dalam aktivitas keagamaan sebagaimana dilakukan partai politik Islam.

Di lihat dari nasab ideologisnya ke gerakan revitalisme atau salafiah generasi awal abad ke-20 di Indonesia, PKS dapat disebutkan sebagai 'salafiah politik' atau partai politik Islam berhaluan salafiah. Dengan begitu, sungguh pun karakternya dalam batas tertentu agak lebih dekat dengan gerakan-gerakan 'salafiah ideologis', tetapi terdapat perbedaan signifikan seperti apa yang ditampilkan Hizbu Tahrir Indonesia (lihat Sagap, hal; 143).

Di samping dua gerakan salafiah tersebut, terdapat kecendrungan lain yaitu salafiah ideologis. Salafiah ideologis ini menampilkan diri dengan dua karakter sekaligus, disatu pihak ingin menegakkan Islam yang dipandang murni sebagai salafiah, tetapi sekaligus masuk ke ranah politik dengan tidak secara langsung menjalankan aktivitas-aktivitas politik dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia sebagaimana partai politik Islam pada umumnya. Gerakannya terfokus pada perjuangan untuk melembagakan syariat Islam dalam institusi negara hingga membangun kesadaran untuk terbentuknya politik negara khalifah atau negara Islam. Gerakannya tidak hanya melakukan aktivitas politik sebagaimana salafiah dakwah sehingga cenderung pada tataran gerakan ideologis, yakni bergerak antara ide dan aktivisme politik seperti yang ditunjukkan Hizbu Tahrir Indonesia. Hizbu Tahrir kendati mengkalim diri sebagai partai politik, bahkan tidak ambil bagian dalam sistem politik yang ada sekarang ini termasuk di Indonesia berada dalam sistem kufur yang dipengaruhi oleh dan membawa muatan ideologi non-Islam. Oleh karea itu

pula, kemudian Hizbu Tahrir secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik Islam ideologis.<sup>39</sup>

Partai Keadilan Sejahtera menjelaskan ideologinya dalam Falsafah Dasar Perjuangan, falsafah itu merupakan pemikiran mendasar (*al-fikru al-asasi*), berupa kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Konsep ideologi yang aplikatif menjadi peta jalan (road map) menuju solusi bagi krisis multi dimensi yang sedang terjadi di Indonesia karena konsep ini akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam konsep konsolidasi politik di berbagai bidang strategis, seperti ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan, pertanian, energi, pertambangan, dan lain-lain. Format inilah yang menjadi ideologi khas Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi rujukan dalam membangun kepemimpinan opini publik (*opinion leader*).<sup>40</sup>

Haidar Nashir (hal 465, 2007) mengemukakan, bahwa Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan prototipe gerakan pro-syariat –sebagaimana ditunjukkan pada pemilu 1999- belakangan tidak secara eksplisit mengusung isu syariat Islam menampilkan diri dalam gerakan politik sekaligus dakwah. Dengan identitas ganda itu semakin kuat menunjukkan PKS yang mempunyai keterkaitan ideologis dan sekaligus persambungan dengan gerakan tarbiyah yang menjadi penopangnya yang dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, Mesir.

#### 4.4. Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera

Dalam agenda politik yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, terdapat hal mendasar yang penting digarisbawahi dari adanya pandangan filosofis yang mendasari gerakan dakwah, bahwa Islam adalah sebagai agama penyatu yang lengkap.

Abu Ridha dan Untung Wahono (hal, 2 : 2000) menyatakan bahwa Islam bukan hanya sebagai agama yang menyangkut masalah hubungan manusia dengan

<sup>39</sup> Sagap, *ibid*, hal 144.

<sup>40</sup> MPP Partai Keadilan Sejahtera, *Ibid*, hal viii.

tuhan (*hablum minallah*) islam juga sebagai agama penyatu yang lengkap (*a religion of complete integration*) atau sebagai jalan hidup (*the way of life*) dengan totalitas kesempurnaan yang memenuhi seluruh aspek dan seluruh institusi pengatur kehidupan umat manusia.

Sesungguhnya, pandangan seperti ini bukanlah hal yang baru dalam khazanah Islam. Literatur Islam kaya dengan rumusan tentang Islam sebagai agama yang universal. Bahkan tidak sedikit dari kalangan orientalis yang melihat Islam bukan hanya sebagai agama yang bersifat ritual semata, tetapi merupakan agama yang komprehensif. John L. Esposito (hal, 3 : 1990) menegaskan, bahwa Islam tak hanya berdimensi kerohanian, melainkan juga berdimensi kenegaraan. Maka Islam berkembang sebagai gerakan keagamaan dan sekaligus gerakan politik. Seorang muslim percaya bahwa Islam mengemban keimanan dan politik yang bersumberkan wahyu ilahi, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Keyakinan ini mengkrystal dalam ajaran, sejarah, dan pada perkembangan politik umat Islam.

Tujuan pendirian Partai Keadilan Sejahtera adalah agar terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera.<sup>41</sup> Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera memiliki *hajm ma'nawi* (kapasitas moral), *hajm fikri* (kafasitas idealita), *hajm ijtima'i* (kafasitas sosial kemasyarakatan), *hajm ta'tsiri* (kekuatan pengaruh) dan *hajm siyasi* (kapasitas politik). Sehingga dakwah mampu secara struktural memberikan pengaruh terhadap regualsi-regulasi yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui *public reason* yang mengarah bagi terwujudnya kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, dan bertamabat yang diridhai Allah SWT.

---

<sup>41</sup> Seperti yang dikemukakan Hilmi Amidudin (ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera) dalam kata pengantar *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, bahwa tujuan didirikannya Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam AD/ART adalah guna terwujudnya Masyarakat Madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Keadilan Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke yang dilalui garis khatulistiwa. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju, berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuine dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan kontek masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam *ukhuwah Islamiyyah* (ikatan keislaman), *ukhuwah wathaniyyah* (ikatan kebangsaan), dan *ukhuwah basyariyyah* (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suharna Surapranata (hal, ix :2008) menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera sebagai entitas politik nasional secara subyektif berjuang dengan dasar aqidah, asas dan moralitas Islam untuk mencapai tujuan terwujudnya Masyarakat Madani yang adil sejahtera dan bermartabat. PKS berusaha menjadi harapan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang dicita-citakan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai tauhid sebagai landasan tata kehidupan mereka. Di dalamnya terisi dengan individu-individu yang bebas dari sikap menzhalimi diri sendiri. Berkumpul dalam keluarga yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai kebaikan dan keimanan.

Lebih lanjut Suharna menjelaskan, bahwa masyarakat madani ialah masyarakat religius, berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara.<sup>42</sup>

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani dilakukan baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya partai sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera.<sup>43</sup>

Dengan itu, Partai Keadilan Sejahtera akan berjuang secara konstitusional, memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya cita-cita tersebut. Langkah yang dilakukan ialah dengan mempercepat realisasi target partai dari 'partai kader' menjadi 'partai kader berbasis massa yang kokoh' agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu: kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud Negara

<sup>42</sup> DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta, hal, x, 2008.

<sup>43</sup> Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, pasal 5 ayat 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera, 2007.

Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil menjadi kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, amanah, adil, berdaulat dan bermartabat.<sup>44</sup>

Terdapat tiga tujuan pokok dalam pembangunan masyarakat madani, yaitu adil, sejahtera dan bermartabat. *Pertama*, adil ialah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan, baik pembangunan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan kutub ekstrem; mengurangi (*ifrath*) dan melebihi (*tafrith*). Wujud konkret nilai-nilai keadilan dalam aspek kemanusiaan adalah sikap pertengahan (*wasatha*) yang telah menjadi salah satu kekhasan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para cendekiawan muslim meyakini dengan istilah moderasi; suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem.

Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Itulah pangkal kesejahteraan dalam makna yang sejati. Posisi keadilan dalam kehidupan manusia dan alam semesta amat fundamental. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu kelak di sisi Allah SWT berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaitu, mereka yang bertindak adil dalam pemerintahan, terhadap keluarga, dan terhadap bawahan mereka.*" Konsekuensinya, setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Kezaliman itu kegelapan, sedangkan keadilan itu cahaya. Maka, kewajiban menegakkan keadilan dan menumbangkan segala bentuk kezaliman, penindasan, sikap berlebih-lebihan, merugikan orang lain, kebencian, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan harus menjadi bagian dari ideologi Islam. Semangat ini harus mewarnai setiap aksi dan menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Manusia baik secara individual maupun

---

<sup>44</sup> Lihat DPP PKS, *ibid*, hal 207.

kolektif bertanggung jawab menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan.<sup>45</sup>

*Kedua*, Sejahtera artinya aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artiunya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar sebuah dimensi diri. Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia.

Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran modal (modal) dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencita-citakan kesejahteraan untuk semua warga. Akan terlepas dari penyimpangan moral akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam. Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) yang menjamin kesetaraan sosial (*social equity*) kelestarian lingkungan (*environmental prudence*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Semua itu tidak lain merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia (*our common future*).<sup>46</sup>

*Ketiga* bermartabat, artinya menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 208

<sup>46</sup> United Nation, World Committee for Environment and Development, 1987)



penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain.

Untuk mewujudkan masyarakat madani tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mengemban misi negara Indonesia yang dicita-citakan.<sup>47</sup> Misionya itu ialah. *Pertama*, memelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakkan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.

Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang

---

<sup>47</sup> Lihat Indonesia yang Dicitakan dalam, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, hal 213.

solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

*Kedua*, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi. Pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan pelaku usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasamodal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

*Ketiga*, menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga dengan visi sehat badan, mental spritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara. Dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin, kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu, guna terwujudnya masyarakat madani tersebut, pada pemilu 2009 yang akan datang Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan target dan sasaran utamanya, yaitu: menjadi 3 besar memperoleh 20 % kursi Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan mendapatkan suara pemilih 24 juta suara. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional tersebut Partai Keadilan Sejahtera harus mampu mendayagunakan (*istighlalil amtsal*) seluruh potensi aset dakwah yang dimilikinya secara modern, efektif dan efisien.<sup>48</sup>

Untuk meningkatkan frekwensi partai, Dewan Pimpinan Pusat beserta lembaga-lembaga terkait partai merubah slogan resmi Partai Keadilan Sejahtera.<sup>49</sup> Hal ini sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ke VII di Jakarta, yang dikuatkan kembali dalam Musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera IX di Bali adalah Bersih, Peduli dan Profesional.<sup>50</sup>

Bersih menegaskan aspek moral atau kesalehan pribadi, maksudnya mewujudkan para pemegang amanah jabatan yang anti KKN. Peduli merupakan aspek sosial, kesalehan sosial, kepedulian kita kepada kaum dhu'afa dan terhadap para korban bencana. Profesional adalah kesalehan profesi, memiliki *core competency*, *open mind* sehingga berdaya manfaat bagi posisi jabatan yang diamanahkan.<sup>51</sup>

Secara umum, strategi tersebut merupakan mobilitas vertikal kader dakwah adalah upaya-upaya strategis dan sistematis berupa kombinasi antara penataan dalam rangka meningkatkan kredibilitas personal dan penciptaan peluang.

Upaya membangun kredibilitas personal diarahkan pada tiga aspek, yakni; kredibilitas moral yang tercermin dalam kesalehan moral dan bersih, kredibilitas sosial yang tercermin dalam kesalehan sosial dan peduli, dan kredibilitas

<sup>48</sup> DPP Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta, hal, vii, 2008.

<sup>49</sup> Slogan atau semboyan merupakan kalimat singkat, terdiri dari sedikit kata atau frasa yang mudah diingat. Tujuannya untuk menarik perhatian orang atau menyampaikan suatu gagasan secara singkat padat (Oxford Advanced Learner's Dictionary, 2000). Di samping itu, meski terdiri dari kata atau frasa yang terbatas, slogan punya kemampuan menciptakan suatu keyakinan palsu, seperti mitos atau ideologi. Apalagi dalam konteks pilkada, tujuan utama kandidat adalah berkompetisi menarik simpati calon pemilih untuk memilih dirinya sebagai gubernur (Eric Louw, *The Media and Political Process*, 2005). Setidaknya ada tiga kategori tema slogan yang diusung paratai politik. *Pertama*, tentang upaya partai memperkenalkan identitas dirinya. *Kedua*, orientasi visi dan misi yang kebanyakan berupa janji. *Ketiga*, upaya meyakinkan khalayak bahwa partainya layak dipilih.

<sup>50</sup> Slogan adalah jati diri PKS yang merupakan kristalisasi nilai-nilai dan perilaku yang merupakan aset dakwah.

<sup>51</sup> Dapat di lihat pada Bayan (Penjelasan) Seputar isu-isu yang berkembang sebefore, menjelang dan sesudah Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali. Yang dikeluarkan pada tanggal 06 Februari 2008. yang ditanda tangani oleh presiden partai, ketua Dewan Syariah dan ketua Majlis Pertimbangan partai.

profesional (dimilikinya kompetensi, kacakapan manajerial, berpikir strategis sesuai dengan bingkai pengembangan potensi, dan *open mind*), yang menghasilkan keshalehan profesional. Maka pembinaan dan arahan di atas akan mewujudkan kader dakwah yang mempunyai kredibilitas personal yang bersih, Peduli, dan professional.<sup>52</sup>

Presiden Partai Keadilan Sejahtera dalam sebuah Munas menjelaskan bahwa partainya memiliki visi harus menjadi, “partai dakwah yang kokoh untuk melayani dan memimpin bangsa.”<sup>53</sup> Partai dakwah artinya partai ini bukanlah semata-mata partai politik, namun pada hakikatnya ia adalah partai dakwah, di mana ruang lingkup gerakannya akan lebih luas dari sekedar partai politik. Dakwah adalah sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dari masa sebelumnya. Maka akan ada upaya mereformasi suatu perubahan di semua sektor, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, dan yang lainnya.<sup>54</sup>

Kata, kokoh, dalam visinya tersebut ialah memiliki kekuatan. Kekuatan yang riil ialah dapat masuk tiga besar dengan berupaya meraih 20 % suara atau sebanding dengan 24 juta suara. Jika raihan ini dapat dicapai, maka itu adalah sebuah *reality of power* agar mampu bergainig dengan pihak lain<sup>55</sup>. Kata, melayani, merupakan konsekwensi logis yang diberikan kepada rakyat kecil, khususnya. Konsolidasi kekuatan sumber daya kalangan elit kepada wong silik. Pemimpin harus berperan sebagai pelayan masyarakat jangan sampai justru masyarakat yang diminta melayani pejabat. Varian terakhir adalah memimpin, kepemimpinan 2009 orbit Partai Keadilan Sejahtera beralish dari orbit institusi (*muassasi*) menuju orbit kekuasaan (*dawly*). Untuk itu diperlukan tugas-tugas eksekutif yang lebih kongkrit. Dan inilah visi 2009 yang dicanangkan presiden partai.<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup> Platporm Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta, 2007, hal 27.

<sup>53</sup> Tifatul Sembiring, *Dari Qiyadah Untuk Para Kader*, seri kedua, Sekjen Bidng Arsip dan Sejarah DPP PKS, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>54</sup> *Ibid.* hal 2.

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 3.

<sup>56</sup> *Ibid.* hal 5.

Dalam mengejawantahkan hal tersebut, sekjen partai, Anis Matta (hal 6, 2007), menjelaskan. Ada tujuh strategi dalam menumbuhkan mesir Partai Keadilan Sejahtera, yaitu:<sup>57</sup>

1. Pertumbuhan kader, partai akan melakukan quantum politik dengan menargetkan pertumbuhan kader sebanyak dua juta orang dalam menghadapi 2009. asumsinya jika setiap kader merekrut 10 suara, maka akan dicapai dupuluh juta suara dan jumlah tersebut dapat terjangkau.
2. Struktural, yaitu partai memiliki target sebelum tahun 2009, struktur partai telah tercapai 100% di tingkat DPC dan 75 % di tingkat DPRa.
3. Fraksi. Ia adalah ujung tombak yang secara langsung berhubungan dengan konsituen dan media. Jika fraksinya tidak hidup, maka nanti tidak didengar oleh konstituen dan tidak dianggap melayani konstituen. Masing-masing wakil tersebut harus memberikan kontribusi terhadap perkembangan konstituen di daerah pemilihannya.
4. Charity adalah *frame team work* sebuah kerjasama untuk menunjukkan rasa persaudaraan dan simpatik kepada masyarakat sebagai panji Islam yang mengedepankan tolong menolong. Mesin ini harus terus digulirkan sebagai lahan ibadah.
5. Pilkada, yaitu sebagai titik tolak menuju pertempuran besar dalam skup nasional. Pilkada adalah pertempuran kecil, sebagai cermin untuk mencapai yang lebih besar.
6. Icon (simbol), maksunya partai harus di kenal melalui orang-orangnya walaupun yang kuat adalah institusinya. Oleh karena itu, pejabat partai atau menduduki posisi apapun di dewan harus memastikan dikenal baik oleh publik. Popularitasnya harus baik di kalangan publik. Sehingga orang akan melihat Partai Keadilan Sejahtera, *icon* nya banyak, kadernya banyak dan tokohnya banyak. Dengan demikian mampu mengambil alih kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah.

---

<sup>57</sup> Anis Matta, Dari Qiyadah Untuk Para Kader, seri ketiga, Sekjen Bidng Arsip dan Sejarah DPP PKS, Jakarta, 2007, hal. 6.

7. Operasi Politik, yaitu gerilya politik yang dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal. Enam mesin tersebut merupakan kesatuan utuh yang harus dioperasikan agar dapat meraih cita-cita yang diharapkan<sup>58</sup>.

Untuk itu metode dan program yang dijalankan Partai Keadilan Sejahtera bentuknya akan beragam, mulai dari pemberdayaan masyarakat, perekrutan kader, penguatan harakah, gerakan sosial, pendidikan politik, dan dakwah dalam arti luas.

Partai Keadilan Sejahtera bukan sekadar parpol yang mencari kuasa, melainkan juga gerakan dakwah yang mencerdaskan dan memberdayakan rakyat, termasuk gerakan penyadaran masyarakat akan kondisi dan kenyataan yang ada.

#### 4.5. Kebijakan Pragmatis Partai

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah dan menjadikan Islam sebagai dasarnya, berfokus untuk menegakkan dan mengobyektifikasi nilai-nilai universal Islam di Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Obyektifikasi adalah proses transposisi konsep atau ideologi dari wilayah personal subyektif ke ranah publik obyektif.

Fenomena PKS sebagai salah satu parpol Islam yang tidak berkaitan dengan partai politik Islam selama Orde Baru mampu menghentikan stagnasi Islam politik yang diwakili dan disebabkan oleh partai politik Islam lain. PKS mengalami peningkatan yang luar biasa, pada tahun pemilu 2004 dengan mampu meraih 7% suara dengan menempatkan 47 anggota legislatif di tingkat pusat.

Untuk pemilu 2009, PKS menargetkan 3 besar, atau meraih 20% suara. Guna meraih target tersebut, PKS berusaha untuk memobilisasi seluruh aset dakwah yang dimilikinya secara modern, efektif dan efisien di seluruh sektor, baik di infra struktur jaringan partai maupun di sektor publik di lembaga eksekutif pemerintahan pusat maupun daerah.<sup>59</sup>

Boleh jadi, target inilah yang akhirnya mengindikasikan PKS mengalami pergeseran dari *trade mark* yang selama ini kental dengan partai dakwah. Penulis mengidentifikasi terdapat empat hal, adanya perubahan dalam jati diri PKS.

<sup>58</sup> Ibid, hal 12.

<sup>59</sup> MPP. Partai Keadilan Sejahtera, *ibid*, hal vii

#### 4.5.1. Menjadi Partai Terbuka

Partai keadilan sejahtera adalah partai politik yang diusung anak-anak muda. Pada awal berdirinya dulu partai keadilan tidak ada tokoh kharismatik yang mampu menggelorakan konstituennya. Berbeda dengan partai lain yang memiliki pemimpin kharismatik ataupun keterkaitan emosional dengan partai terdahulu.

Seiring dengan berjalannya waktu, partai ini memang dapat banyak mendapatkan simpati masyarakat. Setidaknya dalam pemilihan kepada daerah yang langsung dipilih oleh rakyat, PKS telah meloloskan calonnya di tujuh propinsi.<sup>60</sup> Di samping itu ada juga calon bupati dan wakil bupati, dan walikota dan calon walikota yang diraih dari calon Partai Keadilan Sejahtera.<sup>61</sup>

Untuk menghadapi Pemilu 2009 dan pemilihan presiden, Partai Keadilan Sejahtera telah memulai kampanye, raihannya yang ingin dicapai pun cukup besar, yaitu masuk tiga besar dengan memperoleh 20% suara. Dasar inilah yang menjadikan Partai Keadilan Sejahtera membuka kran untuk menampung calon legislator dari kalangan luar, khususnya non muslim. Fahri Hamzah sebagai elite partai pernah menawari tokoh Hindu untuk menjadi calon anggota legislatif dari PKS.<sup>62</sup> Tentu pernyataan elite partai akan berdampak luas bagi keberadaan partai.

Era keterbukaan partai dapat di pahami adalah terbukanya partai dalam kerjasama untuk meraih kekuasaan. Tujuan kerjasama tersebut memang di dasari untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun apakah kemudian tujuannya dapat terwujud atau tidak, waktu yang akan menentukannya.

Partai keadilan Sejahtera telah mempromosikan bahwa partainya siap berkoalisi dengan partai manapun baik dalam mengusung calon bupati dan

---

<sup>60</sup> Lihat bapilu DPP Partai Keadilan Sejahtera. Sampai dengan bulan Juli 2009.

<sup>61</sup> Ada beberapa calon bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota yang dimenangkan oleh PKS. Diantara yang paling fenomenal ialah calon yang diusung oleh PKS di kabupaten Bekasi, Bogor dan kotamadya Depok.

<sup>62</sup> Pernyataan Fahri Hamzah adalah sebagai berikut, "Kita berkehendak, mau nggak Pak Pedanda menjadi caleg PKS?" tanya Fahri yang disambut tepuk tangan gemuruh peserta Mukernas. Pedanda adalah tokoh Hindu Bali. <http://pksbali.org/2008/02/04/pks-tawari-caleg-tokoh-hindu/>

wakil bupati, walikota dan wakil walikota, gubernur dan calon wakil gubernur, dan presiden dan wakil presiden.

Partai Keadilan Sejahtera sudah membuka kesempatan dalam berkoalisi baik dengan partai Islam maupun partai nasionalis, bahkan dengan partai damai Sejahtera yang notabene partai kristen dan berbeda ideologi. Dalam pemilihan kepala daerah PKS telah berkoalisi dengan PDS. Termasuk juga apabila dikemudian hari dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, jika ada calon presiden dan wakil presiden perempuan. Ketua majlis Syura PKS telah mengisyaratkannya, tentunya jika memang tidak di dapati calon presiden laki-laki yang mampu (*istitha'ah*).<sup>63</sup>

Tifatul Sembiring menguatkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan berkoalisi dengan pertimbangan kepada figur yang akan dicalonkan, terutama yang menjadi syarat adalah latar belakangnya bebas KKN, bermoral bersih, mampu membawa perubahan kepada yang lebih baik, dan propesional. Koalisi ini dapat dilakukan dalam kasus pemilihan kepala daerah.<sup>64</sup>

Menurut Tifatul, ada empat bentuk koalisi yang dilakukan. Pertama, koalisi ideologis. Yakni kerja sama antar kelompok yang secara ideologis bersamaan atau penyamaan akidah dan hal itu terstruktur. Koalisi strategis, yaitu kerja sama yang sifatnya strategis. Ketiga, koalisi taktis, kerja sama yang sifatnya taktis. Dan keempat, koalisi teknis yaitu kerja sama dalam tataran operasional.<sup>65</sup> Empat pertimbangan inilah yang nantinya akan memutuskan apakah akan melakukan koalisi atau tidak.

<sup>63</sup> Seperti yang dinyatakan KH. Hilmi Aminuddin, ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengisyaratkan hal itu jika, anggota Majelis Syura yang terdiri dari 99 orang menghendaki hal itu. Sumber diolah dari hasil wawancara di Jakarta 21 Desember 2008.

<sup>64</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring.

<sup>65</sup> *Ibid.* Dhurorudin Mashad, *Akar konflik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, 2008, menjelaskan tentang bentuk aliansi yang dipraktekkan oleh Partai Keadilan (PK). Pertama, aliansi ideologis, yakni kerja sama antar kelompok yang secara ideologis bersamaan, seperti antar partai-partai Islam yang melebur dalam satu partai tunggal. Kedua, aliansi strategis, yaitu kerja sama antara partai politik yang punya tujuan sama ke dalam satu federasi, tetapi tetap ada faksi-faksi. Hal ini dapat dilihat dari kasus NU, PSII, Perti dalam Liga Muslim atau NU, PSII, Perti, Parmusi dalam PPP. Ketiga aliansi taktis yakni kerja sama diantara parpol yang programnya sama untuk melakukan kerjasama. Namun tanpa perlu memerlukan kepemimpinan bersama, seperti terlihat pada Forum Solidaritas Parta-partai Islam (FSPPI) dan poros tengah. Keempat, aliansi teknis, yaitu kerjasama yang terkait dengan penggunaan sarana tertentu. Termasuk boleh dengan kelompok non muslim sebagai bagian dari strategi dalam memenangkan perjuangan dan mewujudkan cita-cita politik.



Dhurorudin Mashad (hal 217, 2008) menegaskan bahwa koalisi atau kerja sama dalam konstelasi politik Islam boleh dilakukan, hanya satu rambu yang harus dipertimbangkan, yaitu aspek syar'i (aspek hukum Islam) serta tetap dalam koridor Islam. Dan, partai yang menjadikan Islam akar ideologinya tentu harus memperhatikan hal itu.

#### 4.5.2. Memudarnya Ideologi

Partai Keadilan Sejahtera berangkat dari ideologi Islam dengan moral dasar Islam dan hal itu sudah menjadi prinsip. Prinsip ini sesungguhnya terinspirasi oleh Piagam Madinah di mana intinya memberikan kebebasan beribadah bagi seluruh warga sesuai keyakinan masing-masing, tidak saling mengganggu dan bersinergi antar komponen bangsa.

Partai Keadilan Sejahtera memiliki AD/ART yang menjadi pedoman keorganisasian, falsafah dasar perjuangan dan platform pembangunan, yang semuanya bersumber dari ajaran Islam.

Partai dakwah tersebut telah dengan tegas menempatkan Islam sebagai landasan dalam memperjuangkan masyarakat madani. Lalu bagaimana partai dakwah tersebut sekarang? Pada mulanya perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera cenderung ideologis ketika institusi politik masih tidak menentu, yaitu antara tahun 1998–2002. Pada saat itu, Partai Keadilan Sejahtera secara organisasi, masih demokratis dengan menempatkan musyawarah nasional (munas) sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi, meyakini moralisme sebagai jalan utama menuju sukses pemilu, dan hanya mau berkolaborasi dengan partai Islam, dan memperjuangkan sistem untuk kemaslahatan rakyat. Namun, konsistensi ideologi Partai Keadilan Sejahtera mulai pudar saat geliat reformasi mulai menemukan jalannya, yaitu pada 2003–2006.<sup>66</sup>

Alasannya, dalam menghadapi pemilu maupun pemilihan kepala daerah, saat ini Partai Keadilan Sejahtera dianggap lebih mengedepankan propaganda politik dan mengutamakan jabatan dalam pemerintahan dibandingkan

---

<sup>66</sup> Artikel dalam analisa Ahmad Norma Permata, penulis disertasi, *Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998–2006*, dalam diskusi di Kantor Maarif Institute, Jakarta. Lihat juga, [www.inilah.com](http://www.inilah.com)

mengurus dakwah moral. Perilaku politiknya lebih dibentuk oleh dinamika proses demokratisasi ketimbang doktrin-doktrin ideologinya.<sup>67</sup>

Di samping itu, pengambil keputusan dalam kebijakan partai pada saat ini berada dalam organisasi majelis Syuro sebagai pengambil keputusan tertinggi (oligarkhis). Begitu pula dalam pencalonan pemilihan kepala daerah, Partai Keadilan Sejahtera bersedia bekerjasama dengan partai mana pun, termasuk partai yang berbeda ideologi agama seperti Partai Damai Sejahtera yang beragama Kristen.<sup>68</sup>

Bagi Norman, tiga alasan tersebut yang mengindikasikan bahwa PKS telah mengalami pergeseran, terutama yang menyangkut masalah kerjasama dengan partai lain. Selain itu, keputusan partai mengenai koalisi lintas partai memang sudah bulat. Hal ini dapat dilihat dalam keputusan majelis syura yang menyatakan hal itu.<sup>69</sup>

Dalam salah satu pertimbangan hasil keputusan adalah berkoalisi dengan partai yang memiliki platform partai. Namun di sisi lain, partai melakukan koalisi dengan partai yang berbeda dengan platform, tentu hal ini adalah kontradiktif.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Keputusan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera dalam pertimbangan mengenai koalisi. Diantaranya pertimbangan koalisi dilakukan sebagai berikut ;

*Pertama* partai keadilan sejahtera akan memperjuangkan Indonesia Madani yang adil, sejahtera dan bermartabat.

*Kedua*, Partai Keadilan Sejahtera siap berkoalisi dengan berbagai komponen bangsa yang sejalan dengan platform Partai Keadilan Sejahtera untuk membangun Indonesia.

*Ketiga*, Partai Keadilan Sejahtera akan berkoalisi dengan pihak-pihak yang :

a.Reformis dan anti korupsi

b.Sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan bangsa

c.Mampu mengelola Pemerintahan dan Negara secara professional

selain memutuskan pertimbangan koalisi, dalam sidang pleno Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ke-10 menetapkan kandidat pemimpin Nasional dari kader Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut :

1. DR. H.M. Hidayat Nur Wahid
2. Ir. H. Tifatul Sembiring
3. DR. H. Salim Segaff Al Jufri
4. H.M. Anis Matta Lc.
5. Prof. DR. H. Irwan Prayitno
6. H. Suharna Surapranata M.T.
7. DR. H. Sohibul Iman MSc.
8. DR. H. Surahman Hidayat, M.A.

Apa yang mengindikasikan sebuah partai telah keluar dari khittah ideologinya? M. Djadijono (hal 85-86) mengemukakan, beberapa partai politik, ideologinya tidak secara konsisten dijadikan penuntun dalam praktek kehidupan politik dalam kehidupan internal partai politik yang bersangkutan. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan hal itu, yaitu; *pertama*, perpecahan yang terjadi dalam hampir semua parpol, termasuk yang berideologi keagamaan tertentu. *Kedua*, perilaku politik elit partatai yang duduk di legislatif yang terlihat bukanlah perjuangan untuk melaksanakan asas atau ideologi partainya untuk ditetapkan menjadi kebijakan kenegaraan demi sebesar-besarnya kesekjahteraan rakyat, melainkan lebih mementingkan porolehan posisi dan keuntungan diri dan golongannya semata-mata. *Ketiga*, ideologi yang dianut setiap parpol tidak dipraktekkan secara ketat untuk mengelola hubungan antara parpol yang berbeda asas atau ideologi dalam pemasanganan presiden dan wakil presiden maupun pasangan calon kepala daerah. Dengan kata lain, telah terjadi hubungan ideologis antara parpol yang bersifat cair, hal ini mungkin karena defenisi parpol itu sendiri sebagai sarana pencarian kekuasaan politik.

Di samping itu politis partai diantara dua sisi mata uang, antara idealisme dan etika politis sebagai bagian dari pemerintahan. Sebenarnya banyak kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan idealisme dan nurani qiyadah, tetapi sisi lain sebagai bagian dari pembuat kebijakan menimbulkan dilema tersendiri bagi para qiyadah pengambil keputusan. Walaupun keputusan diambil dengan mekanisme syura' tetap saja ada aspek mudharat dalam setiap keputusan.

Bahkan ketika merasa bahwa tujuan koalisi hampir tak tercapai selama masa berjalan sempat muncul wacana untuk keluar dari koalisi dengan pemerintahan. Namun, setelah diadakan musyawarah dan menimbang antara berbagai maslahat dan mudharat akhirnya diputuskan partai tetap menjadi bagian dari pemerintahan.

Perbedaan pendapat yang terdapat dalam internal partai, terutama yang dilakukan elite partai akan berdampak pada kalangan bawah dan hal itu akan

menjadi batu sandungan perjalanan partai. Beberapa ustadz yang dulu menjadi pencetus dakwah politik telah mengalami perubahan dalam cara pandang partai. Mereka tidak menemukan idealisme dalam sistem partai ini.

#### 4.5.3. Memudarnya Gerakan Sosial

Kemanakah gerakan sosial yang biasanya menjadi kekhasan Partai Dakwah, seperti pengobatan gratis, khitanan masal, kerja bakti bersama, dan yang lainnya. Aktifitas itu, bukan saja dilakukan pada moment tertentu seperti mushibah banjir, gempa, longsor, dan sebagainya. Akan tetapi, PKS biasa melakukan kegiatan sosial tersebut sebagai agenda kulturalnya, yang memang sudah biasa kerap dilakukan. Atau para kader ini, telah dihabiskan tenaganya untuk menghadapi pemilihan kepala daerah, pemilihan umum dan pemilihan presiden, sehingga aktifitas sosialnya ini hampir tidak di dapatinya sekarang, kecuali moment-moment tadi.

Padahal jika diteliti lebih jauh, pencitraan melalui gerakan sosial sudah menjadi *trade mark* Partai Keadilan Sejahtera, dan hal itu yang menjadi daya tarik masyarakat sehingga dapat meraih dukungan dari masyarakat.<sup>70</sup> Terdapat dinamisasi aksi yang membuat masyarakat terpicat dengan *dakwah bil hal* yang dilakukan partai Dakwah, dan diantaranya adalah dalam gerakan sosialnya.

Sesungguhnya transformasi sosial yang di lakukan Partai Keadilan Sejahtera dapat ditempatkan sebagai kampanye alternatif partai tentang perubahan sosial, dalam melakukan perubahan. Menurut Smith (hal 163, 1985) dalam sebuah penelitiannya menjelaskan bahwa perubahan dalam konteks modernisasi politik, menyoroti perpindahan pandangan politik elite tradisional ke pandangan politik partisipasi massa, yang merupakan salah satu ciri fundamental dalam proses pembangunan politik. Smith menegaskan, bahwa dengan perputaran massa, lambang-lambang, masalah-masalah, organisasi-organisasi dan pemimpin agama memainkan peranan penting untuk menarik kelompok massa ke dalam proses percaturan politik. Secara sederhana,

---

<sup>70</sup> Lihat Dhurorudin mashad, *ibid*, hal 276.

dikalangan transisional, agama dapat berperan sebagai sarana untuk menyadarkan massa terhadap percaturan politik.

Parpol memiliki kunci untuk melakukan perubahan dan mensejahterakan masyarakat. Namun jika partai sudah berambisi mengejar keinginannya maka rakyat akan menjadi korban. Mochtar Pabottingi, mengutarakan bahwa jika partai politik sudah mengesampingkan kemaslahatan masyarakat dan hanya memenuhi cita-cita partainya, hal ini membuktikan bahwa parpol telah mengkhianati rakyat. Kepentingan bangsa dalam kontek masyarakat harus memiliki tempat yang baik. Karena jika kemudian masyarakat ditingalkan, rakyat akan mendapati kemunduran.<sup>71</sup>

Rakyat menyalurkan aspirasinya melalui Partai politik, dan para wakil rakyat yang mereka pilih secara langsung adalah tumpuan untuk dapat membuat kebijakan dan peraturan yang mensejahterakan masyarakat. Namun, jika para wakil rakyat ternyata lebih memihak penguasa dengan lolosnya berbagai kebijakan tak populer, maka yang mengalami kerugian adalah mayoritas masyarakat. Tidak sedikit kasus yang terjadi seperti, melambungnyanya harga-harga bahan pokok ataupun penutupan biaya yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan seperti inilah yang dinilai akibat para legislator gagal melakukan diplomasi politik terhadap penyelenggara pemerintahan. Kebijakan eksekutif malah lebih mendominasi. Kalaupun ada pembelaan dari segelintir politisi yang menyandang predikat wakil rakyat, hasilnya tak tampak.

Menurut J Kristiadi,<sup>72</sup> partai-partai politik di Indonesia sebenarnya belum menjalankan kodratnya sebagaimana layaknya sebuah parpol seperti dipraktikkan di negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Di negara-negara maju, partai-partai politik memiliki tiga fungsi atau tripartit, yakni fungsi dalam pemilu, fungsi dalam organisasi, dan fungsi dalam pemerintahan. Dalam pemilu, partai harus dapat menyederhanakan pilihan-pilihan bagi para pemilihnya, mendidik warga negara, memproduksi (*generate*) simbol-simbol untuk mengikat kesetiaan, dan memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi.

---

<sup>71</sup> Ia adalah salah satu pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lihat juga, [milahdotcom\]http://pkd-dramaga.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=131](http://pkd-dramaga.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=131)

<sup>72</sup> Ia adalah pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Dalam organisasi, partai-partai politik melakukan rekrutmen, pelatihan, artikulasi kepentingan, dan agregasi. Sementara dalam pemerintahan, mereka harus menciptakan mayoritas, mengorganisasikan pemerintahan, mengimplementasikan kebijakan, mengorganisasikan perbedaan, menjamin pertanggungjawaban, dan melakukan kontrol. Dari semua fungsi itu, yang sudah dijalankan oleh partai-partai politik di Indonesia baru rekrutmen, dalam arti menempatkan orang-orang jika ia berhasil memobilisasi massa untuk berkuasa. Kegagalan partai-partai politik menjalankan fungsi yang lain disebabkan mereka tidak memiliki ideologi atau cita-cita partai yang inklusif dan dilaksanakan dengan baik.<sup>73</sup>

#### 4.5.4. Memudarnya Idealisme

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang banyak dipelopori kalangan muda memiliki dealisme positif dalam melaksanakan konstilasi politiknya. Pada pemilu 2004 dapat meraih suara yang signifikan. Para pemilih Partai Keadilan Sejahtera, bukan memilihnya karena simbol ataupun isu agama yang dijadikan isu.

Dhurorudin Mashad (hal 275, 2008) menjelaskan terdapat aspek-aspek pemilih yang beralasan memilih Partai Keadilan Sejahtera, yaitu:

*Pertama*, Partai Keadilan Sejahtera dianggap tanggap terhadap isu politik lokal dan nasional. *Kedua*, realita anggota legislatif Partai Keadilan (1999-2004) yang berada di parlemen dinilai cukup bersih dibandingkan dengan partai lain. *Ketiga*, kesediaan Partai Keadilan Sejahtera melakukan kontrak politik dengan masyarakat, sehingga menambah kredit poin tentang itikad baik kader dalam berpolitik. *Keempat*, konsistensi Partai Keadilan Sejahtera melakukan *move-move* politik dalam menanggapi berbagai isu masyarakat, sehingga kiprah partai senantiasa tersosialisasi dalam benak masyarakat. *Kelima*, berbagai manuver politik massa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera senantiasa tertata rapi, santun, tidak menimbulkan implikasi negatif dalam masyarakat. Sehingga pelan namun pasti telah membangun citra

---

<sup>73</sup>[http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6741&Itemid=47](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6741&Itemid=47)

positif bagi partai ini di mata masyarakat. Namun, ke manakah performone Partai Keadilan Sejahtera sekarang? Gerakan sosial yang biasa dilakukan partai dakwah ini jarang terekspos, ciri khasnya telah hilang. Menurut Anhar Gonggong,<sup>74</sup> PKS telah kehilangan ciri khas, tidak lagi memiliki karakter dibanding dengan partai lain. Dulu PKS itu punya kekhasan, yaitu demokratis.

Menurut Abdul Gafur Sangadji,<sup>75</sup> Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan ciri dasarnya yang dahulu sebagai partai dakwah, saat ini sudah bergeser menjadi pragmatis.<sup>76</sup> berbagai cara ditempuh untuk merangkul sebanyak-banyaknya pemilih, termasuk menarik simpati unsur perempuan dengan memberikan award. Hal ini tentunya bukan tidak boleh dukungan politik diperluas, tetapi harus pula dibarengi dengan *positioning* yang jelas agar tidak menimbulkan kontroversi.

Abdul Gafur menuturkan, ada *beberapa* hal yang mesti dari awal diperjelas oleh Partai Keadilan Sejahtera, yakni ideologi mereka sebagai partai kader. Hal iniyang nantinya akan sangat disesalkan jika langkah-langkah terobosan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera mengakibatkan kontroversi. Karena jika hal itu dilakukan maka idealisme sebagai partai kader akan pudar.

Inilah yang harus diingat *bahwa* idelisme jati diri jangan sampai punah oleh kepentingan politik. Dan jika hal ini sudah terjadi maka partai telah melakukan terobosan yang pragmatis.<sup>77</sup>

Kasus belum lama yang menjadi indikasi bahwa partai Keadilan Sejahtera mulai memudar idealismenya adalah iklan Soeharto. Iklan yang sejatinya akan menjadi titik tolak partai, malah kemudian banyak menuai kritik karena banyak yang menilai bahwa iklan tersebut syarat dengan muatan politis. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera telah mengesampingkan idealisme yang selama ini diusungnya.

---

<sup>74</sup> Hal itu diungkapkan sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, lihat <http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=6711> kepada Berita8.com, Sabtu (20/12)

<sup>75</sup> Ia adalah pengamat politik Universitas Indonesia.

<sup>76</sup> Lihat, <http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=6711> kepada Berita8.com, Sabtu (20/12)

<sup>77</sup> Ibid.

Menempatkan Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa masih belum tepat, karena ia juga belum mendapatkan gelar tersebut. Pembangunan yang pesat dijadikan alasan untuk menempatkan pada posisi tersebut. Namun, ia belum layak sekalipun telah mendapatkan gelar bapak pembangunan. Alasan yang mendasar dalam hal ini ialah, akselerasi pembangunan di masa Orde Baru dijangkiti penyakit korupsi yang luar biasa, dan kekuasaan Soeharto yang menyebabkan Indonesia yang berkepanjangan.

Yudi Latif,<sup>78</sup> menilai pertimbangan Partai Keadilan Sejahtera memuat Soeharto dalam iklan politiknya adalah bersifat pragmatis. Boleh jadi tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengumpulkan sumberdaya politik atau sumberdaya finansial pendukung Soeharto.<sup>79</sup> Bagi Yudi latif, citra Soeharto yang korup dan pelanggaran HAM hanya dipahami sejumlah elite. Namun, banyak masyarakat yang lebih mengidolakan mantan penguasa Orde Baru itu. Hal itulah, yang dimanfaatkan PKS untuk memperlebar basis dukungan. Secara tidak langsung, Partai Keadilan Sejahtera menyadari basis Islam saja belum cukup untuk mendukung partainya dalam menghadapi pemilu legislatif.

Indikasi lain bahwa idealisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai memudar ialah saat bertemu dengan ahli waris mantan pemimpin Indonesia. Alasan yang dikemukakan adalah rekonsiliasi. Masyarakat dapat menilai sesungguhnya pertemuan tersebut bukan saja silaturahmi, akan tetapi memiliki makna politik tertentu. Anhar menilai apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera akan menuai kontroversi yang dapat melemahkan pencitraan Partai Keadilan Sejahtera.

Arbi Sanit memberikan analisisnya, bahwa keberadaan Partai Keadilan Sejahtera mulai mengalami pergeseran idealismenya. Hal ini dapat dibuktikan saat memberikan penghargaan kepada tokoh muda nasional. Perhargaan tersebut hanya sebatas pembentukan citra, yang pada dasarnya untuk menjaring pemilih mengambang (*swing voters*). Alasan pembuktian adalah dengan memberikan penghargaan kepada kalangan muda, maka akan memberikan citra

---

<sup>78</sup> Pangamat politik Universitas Paramadina

<sup>79</sup> <http://dutamasayarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=5668>



sebagai partai yang berpihak kepada kalangan muda.<sup>80</sup> Disamping itu, hal itu merupakan manufer politik bahwa partai ini inklusif.<sup>81</sup>

Namun, pemberian penghargaan ini hanya bersifat manipulatif. Menurutnya, acara tersebut untuk mendongkrak suara PKS. "Selain kaum muda, PKS juga ingin menjaring pemilih yang masih mengambang (*swing voters*)," ucap dia.

Empat hal ini yang menjadi dasar adanya pergeseran Partai Keadilan Sejahtera dalam kebijakan politik terlihat pragmatis. Jika kita mereunut kepada teori politik sekuler memang tidak ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya pragmatis, baik dalam kepragmatisan materi ataupun kedudukannya. Namun, penulis melihat bahwa partai yang berideologikan Islam tentu harus mencerminkan dan memberikan syiar Islam.

Berbagai kebijakan-kebijakan partai yang bersifat ideologis, idealisme, dan kekhasan perlu tetap dipertahankan, dan harus diakomodir perbedaan pendapat dalam ruang lingkup intren partai. Karena jika hal ini berimbas keluar, akan dinilah sebuah riak yang menyandangkan terdapatnya kepentingan kelompok di dalam.

Hal ini terbukti, tidak sedikit dari para pengamat politik, menilai bahwa dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera sudah mulai terdapat faksi (kelompok) yang berbeda haluan. Burhanudin, membuktikan adanya faksi dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera dalam kasus iklan Soeharto yang mengindikasikan ada sekelompok elit yang ingin mendekati keluarga Soeharto untuk kepentingan 2009.<sup>82</sup>

Lili Somantri menilai sama apa yang dikemukakan oleh Burhanudin. Ia melihat, Keinginan Partai Keadilan Sejahtera dalam memperluas basis dukungan melalui iklan dan pemberian penghargaan, hal ini diprakarsai salah satu faksi dalam tubuh partai Islam itu.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> [http://www.tempo.co.id/hg/politik/2008/11/21/brk\\_20081121-147409,id.html](http://www.tempo.co.id/hg/politik/2008/11/21/brk_20081121-147409,id.html)

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> <http://www.waspada.co.id/berita/mass...nya-kaya.html>.

<sup>83</sup> Terobosan yang dilakukan oleh PKS dalam iklan politik dan pemberian penghargaan kepada para tokoh, menurut Lili Romli dinilai terlalu berani dan sensasional "Saya mengamini seperti

Sebetulnya mengenai adanya perbedaan pandangan dalam tubuh partai tidak dinafikan oleh ketua Majelis Syura. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan itu hanya beda pendapat saja, tidak sampai kepada munculnya faksi-faksi atau kelompok-kelompok dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera yang menyuarakan suara partai. Keputusan partai tetap berada di bawah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Partai.<sup>84</sup>

Tifatul Sembiring sebagai presiden memang tidak menolak adanya perbedaan kelompok dalam tubuh partai. Tetapi, dengan tegas menolak dan menyatakan kalau sampai kepada faksi, seperti yang dikemukakan dalam media; faksi keadilan dan faksi kesejahteraan yang masing-masing mengusung kepentingan hal itu tidak ada.<sup>85</sup>

Penulis melihat boleh jadi, pergeseran yang terjadi adalah akibat dari empat hal yang telah dikemukakan di atas, dan akhirnya menimbulkan adanya perbedaan pandangan dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera.

---

yang ditulis media massa bahwa ada faksi keadilan dan kesejahteraan di tubuh PKS. Iklan dan penghargaan itu kerjaan faksi sejahtera," ujar pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli.

Lili menyampaikan hal itu usai Dialog Interaktif di Gedung DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2008). Lili menjelaskan, faksi keadilan adalah mereka yang masih setia dengan PKS 'lama' dengan nilai-nilai Islam yang kental dan konservatif. Sedangkan faksi sejahtera adalah mereka yang agresif mencoba menarik dukungan di luar basis masa Islam dengan terobosan-terobosan yang berani. "Itu nggak suara bulat PKS," tegas Lili. Menurut Lili, tujuan PKS untuk memperlebar sayap dukungan lewat iklan dan penghargaan tersebut justru bisa menjadi kontraproduktif dari tujuan awalnya. "Kan masih banyak orang yang sakit hati dengan Soeharto, justru bisa jadi bumerang dan ditinggalkan konstituennya yang benci dengan Soeharto," jelasnya. Lili menambahkan, cara yang dilakukan PKS untuk memperlebar basis dukungan di luar massa Islam sebaiknya tidak melalui tindakan-tindakan yang kontroversial seperti itu. "Lebih baik mengumandangkan anti korupsi dan good governance," tandasnya.(lri/nwk). Lihat, [www.detikNews](http://www.detikNews) situs warta era digital Lili Romli Iklan & Penghargaan PKS Kerjaan Faksi Sejahtera.htm.

<sup>84</sup> Bahan diolah dari hasil wawancara dengan Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, KH. Hilmi Aminuddin.

<sup>85</sup> Bahan diolah dari hasil wawancara dengan presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ir. Tifatul Sembiring

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah dipaparkan dari mulai bab I sampai dengan bab IV baik latar belakang, teori, metodologi dan analisa, sekarang masuk pada bab V yang akan menjadi penutup dalam penelitian ini, yaitu, berupa kesimpulan dan saran dari tulisan yang sudah dikaji. Adapun kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini ialah :

*Pertama*, ada target yang ingin diraih Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi pemilihan legislatif pada pemilu 2009. Target inilah yang kemudian menjadi perantara bergesernya PKS dari partai dakwah yang idealismenya kuat dan kokoh, serta ideologi yang tertanam mengakar pada mayoritas kader mulai bergeser.

*Kedua*, pergeseran ideologi yang menjada akar pergerakan mulai memudar, yang otomatis akan berkurangnya idealisme partai. Pergeseran idealisme inilah yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan politis yang dianggap tidak lazim dilakukan partai dakwah dan partai kader.

*Ketiga*, berbagai kebijakan yang muncul terkadang menimbulkan perbedaan pandangan. Jika sebelumnya elite Partai Keadilan Sejahtera selalu solid dalam mengeluarkan statemen yang sama karena perbedaan pandangan tersebut akhirnya terdapat pandangan-pandangan yang seolah-olah mewakili kebijakan partai. Padahal pernyataan dan pandangan tersebut bukanlah keputusan partai.

## 5.2. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan, penulis ada beberapa saran konstruktif yang ingin disampaikan, antara lain :

*Pertama*, Partai Keadilan Sejahtera yang dengan tegas telah menyatakan bahwa Islam adalah ideologinya. Di haruskan berpegang teguh dengan ideologi yang dijadikan landasannya. Kekonsistenan ideologi akan menjadi daya tarik bagi konstituen. Masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas politik. Mereka akan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Dalam berbagai pilkada propinsi maupun pilkada kabupaten kota, Partai Keadilan Sejahtera telah membuktikan dengan berhasil memenangi pilkada dan mampu bersaing (mengalahkan) partai-partai besar yang secara modal politik dan materi lebih banyak.

*Kedua*, idealisme partai yang menjadi kekhasan partai harus tetap dipertahankan untuk menjadi teladan bagi partai politik lain. Langkah-langkah dan kebijakan partai jangan sampai mengorbankan idealisme yang selama ini di usung. Keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan suara yang signifikan pada pemilu 2004 adalah karena idealisme partai yang masih dipegang teguh.

*Ketiga*, perbedaan pandangan elite partai harus diminimalisir, terutama saat berhubungan dengan publik. Pandangan yang berbeda dengan keputusan partai yang dikeluarkan oleh elite politik akan menimbulkan ketidak konsistennan dan hal itu menjadi rentan perpecahan. Padahal selama ini Partai Keadilan Sejahtera termasuk partai yang bebas dari perpecahan.

## Daftar Pustaka

- Abdul Khalik, Farid, 2005. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Abdul Mu'iz Ruslan, Utsman, 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Intermedia.
- Abdullah, Mujiono, 2003. *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Solo: UMS Press.
- Achmad Jaimuri, 2000. *Orientasi Ideologi Gerakan Islam*. Surabaya: Ipam.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2008. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- , 2003, *Kebangkitan Gerakan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Amiruddin, Hasbi, 2006, *Konsep Negara Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1992. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Melton Putra.
- Basrowi Sukidin, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insan Cendikia.
- Bugin Burhan, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Cresswell, John W. *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publication.
- Dhiauddin Rais, Muhammad, 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- DPP PArtai Keadilan Sejahtera, 2007, *Dari Qiyadah Untuk Para Kader Buku ke-1*. Jakarta: Arah Press.
- Eric Louw, 2005. *The Media and Political Process*.
- Haedar Nashir, 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*. Jakarta : PSAP Muhammadiyah.

- Khalifa Abdul Hakim, 1993. *Islamic Ideology*. Lahore: Institute of Islamic Culture.
- Lexy J. Moleong, 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Matta, Anis, 2006. *Dari Gerakan ke Negar*. Jakarta: Fitrah Rabbani.
- Muhammad Furkon, Aay. 2003. *Pengaruh Pemikiran Al-Ikwan Al-Muslimun Terhadap Gerakan Politik Islam Indonesia (1999-2000): Studi Kasus Partai Keadilan*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Nasir, Moh., 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Oxford *Advanced Learner's Dictionary*, 2000.
- Robert K. Yin, 1996. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Russell, Bertrand, *History of Philosophy and its Connetion with Political the Earliest Times to the Present Day*, (Sigit Jatmiko, dkk. *Sejarah Filsafat BARat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- S. Sagap, 2000. *Piagam Madinah Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Said Damanik, Ali. *Fenomena Partai Keadilan, transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Sigmund Neumann, 1963. *Towar A Comparative Study of Political Parties*, dalam Harry Eckstein and David Apter (ed.) *Comparative Politics A Reader*. . New York : The Free Press
- Smith, Donald Eugene, 1985. *Agama dan Modernisasi Politik*. Jakarta : PT. Rajawali.
- Sukidin dan Mundir, 2005. *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*, Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.

Tahir Azhary, Muhammad, 2003. *Bunga Rampai Hukum Islam*. Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit IND-HILL-CO

Titus, Harold H, Smith, Marilyn S, Nolan, Richard, *Living Issues In Philosophy*, (terj. Rasjidi, H.M, *Persoalan-Persoalan Filsafat*). Jakarta: Bulan Bintang.

United Nation, 1987. *World Committee for Environment and Development*.

William James. *Pragmatism*. New York : Longmans.

DPP Partai Keadilan Sejahtera, 2007, *Dari Qiyadah Untuk Para Kader* Buku ke-1, Jakarta, Arah Press

\_\_\_\_\_, 2007, *Dari Qiyadah Untuk Para Kader* Buku ke-2 Jakarta, Arah Press

\_\_\_\_\_, 2007 - *Dari Qiyadah Untuk Para Kader* Buku ke-3 Jakarta, Arah Press

MPP Partai Keadilan Sejahtera, 2007 *Falsafah Dasar Perjuangan*,

\_\_\_\_\_, 2007, *Platform Kebijakan Pembangunan*

*Partai Keadilan Sejahtera*,

[www.pks.or.id](http://www.pks.or.id).

[www.inilah.com](http://www.inilah.com)

[www.indopolitik.com](http://www.indopolitik.com)

[www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com)

[www.osdir.com](http://www.osdir.com)

[www.wikimu.com](http://www.wikimu.com)

Lihat, Abdul Wahab Al-Khayali, 1981, *Masu'ah as-Siyasah, bab Hizb As-Siyasi*, Beirut.

<http://pksbali.org/2008/02/04/pks-tawari-caleg-tokoh-hindu/>

Artikel dalam analisa Ahmad Norma Permata, penulis disertasi, *Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998–2006*.

<http://pks-dramaga.org/?pilih=news&mod=yes&taksi=lihat&id=131>

[http://indonesian.tribune.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6741&Itemid=4](http://indonesian.tribune.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6741&Itemid=4)

<http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=6711> kepada Berita8.com, Sabtu (20/12)

<http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=6711> kepada Berita8.com, Sabtu (20/12)

<http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=5668>

<http://www.tempo.co.id/hg/politik/2008/11/21/brk,20081121-147409,id.html>

<http://www.waspada.co.id/berita/mass...enya-kaya.html>.